



**PENGARUH INSENTIF EKSEKUTIF, *CORPORATE GOVERNANCE*,  
*CORPORATE RISK* DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP *TAX*  
*AVOIDANCE***

(Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-  
2019)

**SKRIPSI**

Oleh :

**Alviyah Inayatul Mahmudah Danur**

**NPM : 4316500015**

Diajukan kepada

**PROGAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2020**



**PENGARUH INSENTIF EKSEKUTIF, *CORPORATE GOVERNANCE*,  
*CORPORATE RISK* DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP *TAX*  
*AVOIDANCE***

(Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-  
2019)

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Pancasakti Tegal

Oleh :

**Alviyah Inayatul Mahmudah Danur**  
**NPM : 4316500015**

Diajukan kepada:

**PROGAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
2020**



**PENGARUH INSENTIF EKSEKUTIF, *CORPORATE GOVERNANCE*,  
*CORPORATE RISK* DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

(Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019)

**SKRIPSI**

Oleh :

**Alviyah Inayatul Mahmudah Danur**

**NPM : 4316500015**

Disetujui Untuk Ujian Skripsi

Tanggal :

Pembimbing I

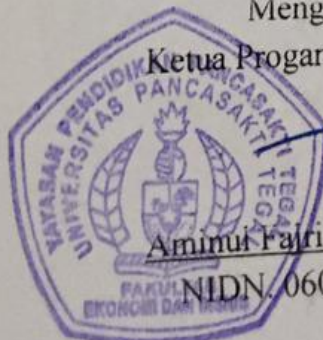
Yanti Puji Astuti, S.E., M.Si  
NIP. 197409142005012002


Pembimbing II

Maulida Dwi Kartikasari, S.E., M.Si  
NIPY. 21662031989

Mengetahui,

Ketua Progam Studi Akuntansi



  
Aminul Fajri, S.E., M.Si., Akt

NIDN. 0602037002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Alviyah Inayatul Mahmudah Danur

NPM : 4316500015

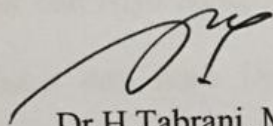
Judul : Pengaruh Insentif Eksekutif, *Corporate Governance*, *Corporate Risk* dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019.

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada:

Hari :

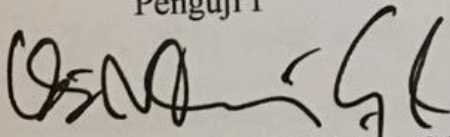
Tanggal:

Ketua Penguji



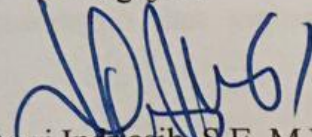
Dr. H. Tabrani, M.M  
NIDN.0612126001

Penguji I



Dr. Dien Noviany R. S.E., M.M., Akt., CA  
NIDN.0628117502

Penguji II



Dr. Dewi Indrasih, S.E., M.M  
NIDN.0616058002

Mengetahui,

Ketua Progam Studi Akuntansi



Aminul Fajri, S.E., M.Si., Akt  
NIDN. 0602037002

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

“ Ketika kamu memiliki tujuan hidup, kamu dapat mencapai apa yang kamu inginkan. Nikmati proses, lakukan dan berdoa”

### **PERSEMBAHAN**

Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk: .

1. Kedua orangtua tercinta Abah Mufidin Danur dan Umi Siti Khofifah, yang telah memberikan semangat, memotivasi dan mendoakan penulis dengan ikhlas.
2. Adiku-adiku tersayang Alwi Ahmad Muttaqien Danur, Ahda Kirom Lahmuddin Danur dan Alya Adifa Muwaffaqoh Danur, serta keluarga besar Marga Danur dan Bani Djudi yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
3. Ibu Yanti Puji Astuti, S.E., M.Si dan ibu Maulida Dwi Kartikasari, S.E., M.Si yang telah memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Saudaraku tersayang Dea Lestari yang sangat membawa pengaruh positif dalam hidupku, selalu meluangkan waktu untuk diskusi, memotivasi dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku Laelatus, Rochmatul, Mutto, Selly, Zaenal M, Wildan dan Indri Widia yang selalu memberikan semangat dan dukungan lebih.
6. Kekasihku tercinta.

7. Teman-Teman prodi Akuntansi A angkatan 2016 yang telah bersama-sama berjuang dan berdoa untuk kelulusan di tahun ini, yang selalu berdiskusi dan saling memberikan semangat.



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alviyah Inayatul Mahmudah Danur

NPM : 4316500015

Progam Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Pajak

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“Pengaruh Insentif Eksekutif, *Corporate Governance*, *Corporate Risk* Dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance* (Study Empiris Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019)”**

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan/atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Saya mengijinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dn etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

Tegal, 19 Juni 2020



Alviyah Inayatul Mahmudah Danur

## **ABSTAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh insentif eksekutif, kepemilikan institusional, komisaris independen, *corporate risk* dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Populasi penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019 yaitu sebanyak 20 perusahaan. sampel penelitian berjumlah 100 laporan perusahaan yang dipilih dengan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan analisis data menggunakan regresi linier. Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa insentif eksekutif, kepemilikan institusional, komisaris independen, *corporate risk* dan koneksi politik tidak memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

**Kata kunci: Insentif Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Corporate Risk, Koneksi Politik, Tax Avoidance**



## **ABSTRACT**

This study aims to empirically examine the effects of executive incentives, institutional ownership, independent commissioners, corporate risk and political connections on tax avoidance. The population of this research is BUMN companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2019, as many as 20 companies. The research sample of 100 company reports were selected by purposive sampling method. The data used are secondary data obtained on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and data analysis using linear regression. The results in this study prove that executive incentives, institutional ownership, independent commissioners, corporate risk and political connections do not have a positive influence on tax avoidance.

**Keywords: Executive Incentives, Institutional Ownership, Independent Commissioners, Corporate Risk, Political Connections, Tax Avoidance**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **”Pengaruh Insentif Eksekutif, *Corporate Governance*, *Corporate Risk* Dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*** (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar dalam BEI Tahun 2015-2019)”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyusun skripsi pada Program Strata (S1) di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E, M.M, Akt, C.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Aminul Fajri, S.E.,M.Si.,Akt, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Yanti Puji Astuti, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada peneliti.
4. Maulida Dwi Kartikasari, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORI .....	13
A. Landasan Teori.....	13
B. Studi Penelitian Terdahulu.....	24
C. Kerangka Pemikiran.....	30
D. Perumusan Hipotesis.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pemilihan Metode .....	37
B. Teknik Pengambilan Sampel .....	37
C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel.....	39
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Pengolahan Data .....	44
F. Analisis Data dan Uji Hipotesis .....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
B. Hasil Penelitian .....	63
C. Pembahasan.....	75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	81
C. Keterbatasan Peneliti.....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	84
LAMPIRAN.....	87

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	28
2. Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria.....	38
3. Daftar sampel perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI.....	38
4. Operasional Variabel.....	43
5. Uji Autokorelasi.....	46
6. Perkembangan Pasar Modal di Indonesia.....	51
7. Uji Statistik Deskriptif.....	63
8. Uji Normalitas.....	65
9. Uji Autokorelasi.....	66
10. Uji Multikolonieritas.....	67
11. Analisis Regresi Linear Berganda.....	70
12. Uji T.....	72
13. Koefisien Determinasi.....	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka berfikir.....	35
2. Uji Heterokedastisitas.....	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LatarBelakang**

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang dilakukan terus-menerus yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat secara materil maupun spiritual, untuk merealisasinya maka Negara harus menggali sumber dana berupa pajak. Pajak adalah salah satu penerimaan yang diberikan untuk Negara khususnya Negara Indonesia, 83,6% penerimaan Negara bersumber dari pajak. Pajak juga bisa dikatakan sebagai penerimaan yang mempunyai umur tidak terbatas, apalagi ditambahnya dengan jumlah penduduk maka akan semakin besar pula penerimaan Negara dari sektor pajak.

Pajak sebagai salah satu kontribusi wajib yang diberikan untuk negara yang terutang dari orang pribadi ataupun badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang dasar, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Menurut Ayu *et al*(2017), pajak merupakan kewajiban secara *financial* yang dikenakan oleh Negara kepada wajib pajak untuk pembiayaan pembangunan publik. Adapun objek yang dikenakan pajak adalah penghasilan. Penghasilan itu sendiri didefinisikan sebagai tambahan dalam hal ekonomis yang diperoleh didalam wilayah Indonesia bahkan diluar wilayah Indonesia yang digunakan untuk



penambahan kekayaan Negara. Penerimaan dari pajak merupakan sumber yang penting untuk berbagai pengeluaran Negara sehingga seluruh wajib pajak baik perseorangan ataupun badan diharapkan dapat menjalankan kewajibannya berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dengan sukarela.

Perpajakan menjadi perhatian utama di Indonesia, karena pajak merupakan bagian terpenting untuk sumber pendapatan Negara. Pajak berfungsi sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluarannya, dan sebagai *regulerend* yakni untuk melaksanakan atau mengatur kebijaksanaan pemerintah pada bidang ekonomi maupun sosial. Pajak sendiri dipungut dengan syarat keadilan, tidak mengganggu ekonomi, syarat yuridis, harus efisien, serta pemungutannya secara sederhana. Penerimaan sektor pajak di Indonesia merupakan sumber penerimaan yang potensial, 83,6% total pendapatan Negara Indonesia didapatkan dari sektor pajak setiap tahunnya. Dari tingginya penerimaan sektor pajak membuat pemerintah mengeluarkan beberapa macam kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak antara lain dengan membuat aturan baru mengenai perpajakan maupun merevisi undang-undang perpajakan(Saputra, 2018).

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah sistem *self assessment*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dengan cara menentukan sendiri besar kecilnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2016:9). Sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia

dapat menyebabkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, karena wajib pajak diberikan kebebasan untuk melaporkan, menghitung dan membayar pajak terutang tanpa ada campur tangan dengan fiskus pajak. Kewenangan yang diberikan untuk wajib pajak tersebut tidak sepenuhnya dijalankan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, kewenangan yang diberikan untuk wajib pajak justru membuat perusahaan sebagai wajib pajak badan lebih mudah untuk melanggar kewajibannya. Kebebasan penghitungan ini menimbulkan upaya wajib pajak untuk mengatur pajaknya dengan menekankan pajak terutangnya (Diawati, 2017).

Negara Indonesia sendiri dikategorikan sebagai *lower middle income countries* yang memiliki *tax ratio* rendah. *Tax ratio* menjadi salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak. Semakin tinggi rasio pajak dari suatu Negara, maka semakin baik juga kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Tahun 2015 *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 11,59% kemudian di tahun 2016 *tax ratio* Indonesia sebesar 10,84%, sedangkan di tahun 2017 *tax ratio* Indonesia hanya 10,67% dan di tahun 2018 *tax ratio* Indonesia 11,42%. Namun *tax ratio* ini masih di bawah rata-rata *tax ratio* Negara *lower middle income countries* yang mencapai 17,7%, di tahun 2019 *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 11,10% dan di tahun 2020 *tax ratio* Indonesia sebesar 11,57%.

Rendahnya *tax ratio* di Indonesia dapat dibandingkan dengan beberapa Negara di Asia Tenggara yang mengindikasikan belum terdapat pengoptimalan penerimaan pajak untuk mempercepat proses

pembangunan nasional. Berdasarkan data APBN 2018 dari Kementerian Keuangan, tahun 2018 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu mengumpulkan Rp1.315,93 triliun atau 92,41% dari Rp1.424,00 triliun yang ditargetkan dalam APBN 2018. Pencapaian tahun 2018 merupakan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Apabila dibandingkan pada tahun 2017, penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan sebesar 14,33% *year-on-year* (yoy). Pertumbuhan ini masih lebih besar dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 4,07% *yoy*. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pada tahun 2017 mencapai Rp1.151,1 triliun atau 89,67% dari target sebesar Rp1.283,6 triliun, kemudian pada tahun 2016 tercatat penerimaan pajak mencapai Rp1.069.90 triliun atau 81,9% dari target sebesar Rp1,355.20 triliun dan pada tahun 2015 kementerian keuangan mencatat penerimaan pajak sebesar Rp1,606.86 triliun atau 81,96% dari target sebesar Rp1,294.26 triliun.

Penerimaan pajak di awal tahun 2020 mengalami penurunan, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pada Januari 2020 hanya Rp 80,2 Triliun. Menurut perusahaan, pajak merupakan salah satu bagian penting dari biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurangi laba bersih dari perusahaan. Dari pengertian diatas, dapat diartikan pula bahwa pemerintah mengharapkan masyarakat melaksanakan kewajibannya dalam kepatuhan wajib pajak dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Negara Indonesia. Namun, dari pandangan sektor bisnis perusahaan sebagai wajib pajak badan memandang bahwa

pajak sebagai beban yang akan menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian dan arus kas. Beban pajak yang tinggi sangat mendorong banyak perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak dan bahkan menimbulkan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dari perbedaan kepentingan inilah memunculkan adanya konflik kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak, perusahaan akan melakukan *tax planning* yang tidak melanggar dari peraturan-peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dalam hal ini pemerintah tidak bisa memberikan hukuman kepada perusahaan yang telah melakukan *tax avoidance*.

Kasus di tahun 2016 nama perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersangkut dalam panama papers, dimana dari kasus ini menjadi sorotan berbagai dunia, keberadaan BUMN yang memiliki *shell company* di Negara *tax haven* perlu ditindaklanjuti dengan melaporkan kepada direktorat jendral pajak dan perbendaharaan Negara terkait asset BUMN yang tidak terlapor. Perusahaan-perusahaan BUMN per Juni 2019 juga mencatat nilai hutang dari PT Waskita Karya Tbk (WSKT) senilai Rp 103,7 triliun, dari tingkat hutang yang tinggi dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan, Karena adanya hutang mampu memperkecil biaya pajak dengan tujuan agar biaya yang seharusnya untuk membayar pajak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lainya (Ayu *et al.*, 2017)

Perusahaan BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki sebagian besar, atau sebagian kecil maupun sepenuhnya oleh pemerintah dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya. Manfaat dari BUMN adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup dan mengisi kas Negara yang bertujuan untuk pengembangan perekonomian Negara. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersatu mendukung integritas data perpajakan. Namun saat ini masalah BUMNpun bukan sebatas uang dan hutang, Melainkan isu teknis seperti tata kelola yang salah atau sistem yang eror.

Insentif eksekutif berhubungan langsung dengan keagenan serta konflik keagenan, Insentif diberikan bertujuan agar meningkatkan motivasi untuk eksekutif di perusahaan sehingga dapat bekerja dengan baik. Eksekutif memiliki peran penting untuk menentukan arah atau kebijakan dari sebuah perusahaan dan perusahaan yang melakukan *tax avoidance* tentu melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Jika di hubungkan dengan *tax avoidance*, eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima insentif yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi. Kinerja yang dimaksud salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Peran *corporate governance* diharapkan mampu mengendalikan munculnya dari masalah yang terjadi. *Corporate governance* adalah sistem pengendalian internal perusahaan pada kinerja manajemen sebagai

pengelola perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi resiko adanya konflik keagenan antar pemegang saham untuk memenuhi tujuan bersama dengan cara mengamankan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham untuk jangka panjang. Kepemilikan institusional merupakan proksi lain yang menunjukkan adanya *corporate governance*, kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham oleh pihak pemerintah, intitusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri atau bahkan institusi lainnya (Atari *et al*, 2016).

Kepemilikan saham dari pihak institusional memiliki arti penting untuk monitoring manajemen karena dapat memberikan dorongan untuk peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pihak investor institusional akan melakukan usaha pengawasan yang lebih luas dan besar jika tingkat dari kepemilikan saham oleh pihak institusioanal itu tinggi. Penelitian dari Mulyani, *et al* (2018) dan Khan, *et al* (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mappadang, *et al* (2018) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

Salah satu karakteristik dari *corporate governance* yang wajib dimiliki oleh perusahaan adalah komisaris independen. Komisaris independen juga berfungsi untuk membantu mengelola perusahaan dengan baik, melaksanakan pengawasan, dan membuat laporan keuangan

perusahaan yang objektif. Kecurangan yang terjadi didalam sebuah perusahaan diharapkan mampu diminimalisir oleh komisaris independen.

Risiko perusahaan termasuk cerminan atas kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan yang kemudian dapat memberikan indikasi karakter *risk taking* atau *risk averse*, risiko perusahaan yang merupakan salah satu kondisi dimana kemungkinan yang dapat menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah dari yang diharapkan suatu perusahaan karena adanya suatu kondisi tertentu yang tidak pasti dimasa yang akan datang. Menurut Putra (2019), pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* akan lebih berani dalam mengambil sebuah resiko walaupun keputusan tersebut beresiko sangat tinggi dan pemilik karakter seperti ini juga tidak mudah ragu untuk melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk berkembangnya perusahaan.

BUMN saat ini juga terdapat kasus korupsi, yang diduga adanya pengaruh kepentingan politik diperusahaan pelat merah. Beberapa penelitian telah meneliti hubungan antara koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Menurut Ayu *et al.*, (2017) koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan yang sahamnya sebagian besar dikuasai oleh pemerintah juga ditetapkan sebagai wajib pajak yang terdapat resiko rendah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor.71/PMK.03/2010. Agar berlangsungnya perusahaan dapat selalu terjamin, tentunya perusahaan akan menjaga citra dengan baik. Hasil penelitian yang sama juga terdapat pada penelitian Darwiset



al(2019) bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena semakin besar hubungan politik maka semakin kecil peluang untuk dapat melakukan penghindaran pajak.

Darwis *et al* (2019) dalam penelitiannya pada perusahaan BUMN 2013-2017 menjelaskan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wulansari & Dewi (2017) yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Putra (2019) juga menjelaskan bahwa *corporate risk* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, berbeda dengan hasil penelitian dari Ayu *et al* (2015) yang menjelaskan bahwa *corporate risk* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang dan pemikiran yang telah dijelaskan diatas, perlu adanya peninjauan kembali untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Insentif Eksekutif, *Corporate Governance*, *Corporate Risk* Dan Koneksi politik Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah tersebut :

1. Apakah insentif eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 ?

2. Apakah *corporate governance* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 ?
3. Apakah *corporate risk* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 ?
4. Apakah koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 ?

### **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah insentif eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah *corporate governance* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah *corporate risk* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan

BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

- d. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

## 2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat antara lain sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis

Sebagai mahasiswa jurusan Akuntansi, dapat memberikan manfaat untuk mengemban ilmu pengetahuan serta dapat menambahkan referensi secara luas dan mendalam yang berkaitan dengan *tax avoidance*.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dari pihak pemerintah terutama bagi Direktorat Jenral Pajak (DJP) dan pengawas pasar modal dapat membuat kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak badan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

- 2) Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan para investor dalam mengambil sebuah keputusan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan.

3) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi dan menambah pengetahuan tentang ilmu Akuntansi, khususnya tentang insentif eksekutif, *corporate governance*, *corporate risk* dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teory agensi ( Agency theory)**

Terjadinya hubungan keagenan (*Agency relationship*) yaitu ketika salah satu atau lebih individu disebut sebagai prinsipal menyewa organisasi maupun individu yang disebut sebagai agen melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat suatu keputusan kepada agen tersebut. Teori keagenan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dimana masing-masing akan mementingkan dirinya sendiri. Kunci dari teori keagenan sendiri adalah dapat dilihat dari perbedaan tujuan dari prinsipal dan agen, hal ini dapat menyebabkan asimetri informasi antara berbagai pihak karena pihak manajemen tentunya mendapatkan informasi yang lebih dibandingkan dengan pihak eksternal.

Teori keagenan yang mendasari adanya *tax avoidance* pada penelitian ini adalah pemerintah sebagai prinsipal dan perusahaan sebagai agen. Pemerintah sebagai prinsipal memerintahkan perusahaan agar membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Namun, hal ini bertentangan dengan perusahaan sebagai agen yang lebih mengutamakan kepentingan untuk dapat mengoptimalkan laba sehingga mampu menarik para investor dan juga dapat

meminimalisir beban, termasuk dalam menekankan beban pajak dengan cara melakukan praktik *tax avoidance*.

Menurut Fiandri & Muid (2017) teori dari keagenan memiliki tiga asumsi sifat manusia yaitu :

- a. Pada hakikatnya manusia selalu mementingkan diri sendiri (*self-interest*).
- b. Kemampuan berfikir manusia mengenai persepsi masa depan sangat terbatas (*bounded rationality*).
- c. Manusia selalu menghindari dari sebuah resiko (*risk averse*).

Dari tiga asumsi sifat manusia tersebut, manajer sebagai manusia juga akan melakukan tindakan untuk mengutamakan kepentingan pribadinya.

## **2. *Tax avoidance***

### **a. Pengertian *Tax Avoidance***

*Tax avoidance* adalah salah satu bentuk perlawanan aktif terhadap pajak. Perlawanan aktif ini meliputi usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak (Brotodiharjo,1986:14). Sedangkan penghindaran pajak menurut Pohan (2011;14) merupakan upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana metode maupun teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri

untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tax avoidance merupakan usaha yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang dan peraturan perpajakan.

b. Indikator *Tax Avoidance*

1) Menahan Diri

Menahan diri merupakan wajib pajak yang tidak melakukan tindakan untuk bisa dikenai pajak.

2) Pindah Lokasi

Pindah lokasi merupakan memindahkan lokasi usaha dari lokasi yang tarif awal pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

3) Penghindaran Pajak Secara Yuridis

Penghindaran pajak secara yuridis adalah perbuatan yang dilakukan dengan berbagai cara agar tidak dikenai pajak, yaitu dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan dari peraturan.

c. Skema Penghindara Pajak

1) *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* merupakan penentuan harga dari sebuah transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (DJP Nomor PER-32/PJ/2011). *Transfer pricing* juga dapat dikatakan sebagai jumlah harga atas penyerahan (*transfer*) barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua



pihak pada transaksi bisnis ataupun financial (Gunadi. 1994). *Transfer pricing* juga digunakan untuk merekayasa pembebanan harga dari suatu transaksi antara perusahaan satu dengan perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa untuk dapat meminimalkan beban pajak yang terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan.

## 2) Pemanfaatan *Tax Haven Country*

*Tax haven country* adalah suatu tempat yang menawarkan kewajiban pajak yang rendah atau daerah dimana pengusaha yang melakukan usaha namun tidak dikenakan pajak.

## 3) *Thin capitalization*

*Thin capitalization* adalah modal terselubung melalui sebuah pinjaman yang melampaui batas dari kewajaran. Pinjaman yang dimaksud dalam konteks ini adalah pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham maupun pihak lain yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak pinjaman (Rohatgi, 2002).

Menurut Gunadi (1994), pemberian pinjaman dalam konteks *thin capitalization* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. *Direct loan*, pinjaman ini diperoleh secara langsung dari investor. Dari pinjaman tersebut investor mendapatkan bunga dan besarnya bungaditentukan dari investor tersebut.

2. *Back to back loan*, investor akan menyerahkan dananya kepada mediator sebagai pihak ketiga untuk dapat langsung dipinjamkan kepada anak perusahaan dengan cara memberinya imbalan.
3. *Paralel loan*, investor luar negri mencari mitra perusahaan Indonesia yang memiliki anak perusahaan di Negara investor. Sebagai imbalan dari pemberian pinjaman kepada anak perusahaan (Indonesia) di Negara investor, kemudian investor akan meminta kepada perusahaan Indonesia untuk memberikan pinjaman juga kepada anak perusahaan milik investor di Indonesia.
4. *Treaty Shopping*

*Tax treaty* berguna sebagai objek untuk melakukan aktivitas *tax avoidance*, meskipun pada hakekatnya *tax treaty* bertujuan untuk mencegah penghindara pajak. Skema dari *treaty shopping* sendiri dapat dilakukan oleh penduduk suatu Negara yang tidak memiliki *tax treaty* namun mendirikan anak perusahaan di Negara yang memiliki *tax treaty* dan melakukan kegiatan investasinya melalui anak perusahaan tersebut, sehingga tarif pajak yang rendah dan fasilitas perpajakan lainnya yang tercantum dalam *tax treaty* dapat dinikmati investor.

### 5. *Controlled Foreign corporation (CFC)*

*Controlled Foreign corporation (CFC)* Merupakan penghindaran pajak yang dilakukan dengan menunda pengakuan penghasilan modal yang bersumber dari luar negeri khususnya di Negara *tax haven* untuk dapat dikenakan pajak di dalam negeri. Skema dari *Controlled Foreign corporation* dilakukan dengan cara mendirikan entitas di luar negeri dimana wajib pajak dalam negeri (WPDN) memiliki sebuah pengendalian. Menahan laba yang seharusnya diberikan kepada para pemegang sahamnya merupakan upaya dari wajib pajak dalam negeri untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar atas investasi yang dilakukan di luar negeri. Badan usaha di luar negeri dapat dikendalikan dengan cara memanfaatkan hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas saham sehingga deviden tidak dibagikan. Upaya diatas dapat menguntungkan bagi sebuah perusahaan jika badan usaha diluar negeri didirikan dinegara *tax haven*.

Perhitungan *tax avoidance* dapat diketahui dari presentase *cash effective tax rate (CETR)*, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi presentase CETR mengidentifikasikan semakin rendanya tingkat *tax avoidance* pada perusahaan, karena perusahaan telah memenuhi kewajibanya untuk membayar pajak dengan baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat presentase CETR mengidentifikasikan semakin tingginya tingkat *tax avoidance*.

perusahaan karena perusahaan tidak sepenuhnya memenuhi kewajibanya untuk membayar pajak sesuai dengan besarnya beban pajak yang dikenakan untuk seluruh penghasilan kena pajak(Diawati, 2017).

### **3. Insentif Eksekutif**

Menurut (Saputra, 2018), insentif eksekutif adalah cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi para eksekutif agar mencapai tujuan dari perusahaan. Maka dari itu, insentif yang tinggi untuk eksekutif adalah cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima insentif lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan sesuai dari tujuanya. Kinerja yang dimaksud salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak dengan melakukan *tax avoidance*.

Insentif eksekutif merupakan penghargaan baik berupa materi maupun non materi yang diberikan eksekutif agar termotivasi dalam mencapai tujuan perusahaan (Ayu et al., 2015), definisi diatas dapat disimpulkan bahwa insentif eksekutif adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada pihak eksekutif untuk menjadi motivasi agar mencapai tujuan dari perusahaan.

Standar insentif di Indonesia yang diberikan kepada eksekutif memiliki aturan yang baku. Cara perhitungan dan besarnya tergantung dari masing-masing perusahaan, sehingga setiap perusahaan mempunyai variasi dalam penentuan insentif yang diberikan insentif di Indonesia

mencakup honorarium atau gaji, bonus dan tunjangan. Perhitungan bonus tergantung pada kebijakan perusahaan. Bonus tentu saja akan diberikan jika eksekutif dapat mencapai target dari yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan gaji maupun tunjangan memiliki sifat yang sangat tepat. Namun jika insentif hanya diberi gaji maupun tunjangan tentu saja tidak akan meningkatkan motivasi pada eksekutif, berbeda dengan bonus yang tentu akan membuat eksekutif bertindak oportunistik untuk mendapatkannya.

#### **4. *Corporate Governance***

*Corporate governance* merupakan mekanisme pemantauan yang memiliki tujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan manajemen maupun pemegang saham sehingga dapat meminimalkan perilaku manajemen yang bermula dari konflik kepentingan (Yuniarsih, 2018). Disisi lain, *corporate governance* juga dapat diartikan sebagai suatu konsep yang ditunjukkan untuk peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan dapat menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan (Mulyani *et al.*, 2018).

Tujuan dari *corporate governance* adalah agar kinerja perusahaan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan bersama dan menghindari kecurangan dalam manajemen perusahaan serta dapat membuat laporan keuangan yang akuntabel bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengambil sebuah keputusan yang ada pada struktur

dengan tujuan mengatur pola hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi(Ningsing & Mildawati, 2017). *Corporate governance* sebagai tata kelola perusahaan dapat menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pemimpin. Keputusan dari pemimpin dapat mempengaruhi kinerja dari suatu perusahaan termasuk dalam penghindaran pajak. *Corporate governance* dalam penelitian ini meliputi :

a) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan presentasi saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas lima persen (5%) namun tidak termasuk pada golongan kepemilikan insider atau menejeral. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan instusional merupakan proporsi saham yang dimiliki pihak institusi ,yaitu seperti pemerintah, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain baik dalam negri maupun asing dengan kepemilikan diatas lima persen (5%) (Sandy & Lukviarman, 2015).

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan untuk mengurangi insentif bagi para manajer yang lebih mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional bertujuan untuk menekankan kecendrungan manajemen untuk memanfaatkan discretionary dalam laporan keuangan sehingga dapat memberikan kualitas untuk laba yang dilaporkan.Selain itu, manfaat dari kepemilikan institusional yaitu untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses

monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen untuk melakukan manajemen laba. Tingkat kepemilikan saham yang tinggi dapat menyebabkan kemunculan usaha investor institusional untuk melakukan pengawasan yang lebih besar terhadap pihak manajemen, sehingga dapat menghalangi manajemen untuk berlaku *opportunistic* (Andriani, 2019).

b) Komisaris Independen

Komisaris adalah anggota komisaris yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan yang mampu mempengaruhi kemampuan dengan bertindak independen. Keberadaan komisaris independen bertujuan untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang objektif dan menempatkan kewajaran hingga kesetaraan antara kepentingan pemegang saham hingga *stakholder* lainnya (Anggodo *et al.*, 2017). Pada penelitian yang dilakukan Ayu *et al.* (2015) menyatakan bahwa pada peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, presentase jumlah dari komisaris independen minimal 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Dan dapat dikatakan bahwa komisaris independen mempresentasikan kepentingan para pemegang saham minoritas atau pemegang saham publik. Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa komisaris independen merupakan dewan yang tidak terafiliasi dengan direksi dan bertindak independen atau semata-mata untuk kepentingan perseorangan.



## 5. *Corporate Risk*

*Corporat risk* merupakan suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah dari apa yang diharapkan, karena terdapat kondisi tertentu yang tidak pasti dimasa mendatang. *Corporate risk* yang terdapat pada suatu perusahaan yang tinggi cenderung akan menyajikan laporan keuangan apa adanya agar dapat melihat seberapa jauh kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan sehingga peluang untuk melakukan penghindaran pajak menjadi rendah (Ayu *et al.*,2015). Dari definisi diatas maka bisa disimpulkan bahwa resiko perusahaan adalah cerminan dari perusahaan ,maka perusahaan yang menjaga citranya akan menyajikan laporan keuangan apa adanya.

## 6. Koneksi Politik

Koneksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan hubungan yang mampu memudahkan segala urusan. Sedangkan politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pengetahuan mengenai ketatanegaraan. Didalam kehidupan sehari-hari keterkaitan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan. Karena keduanya akan saling mempengaruhi satu sama lain, jadi apabila kita ingin memisahkan antara ilmu politik dengan ilmu ekonomi hanya akan dapat dilihat secara analisis saja. Karena sisbiosis keduanya dapat dilihat secara jelas, mulai dari mencermati keputusan-keputusan maupun aturan pemerintah dalam

kaitanya dengan sistem politik maupun sistem ekonomi pemerintah tersebut (Ilma *et al*,2017).

perusahaan yang dapat dikatakan terkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu memiliki hubungan atau usaha-usaha dengan politik(Tehupuring & Rossa, 2016). Dengan demikian koneksi politik bisa dikatakan bahwa adanya hubungan atau kedekatan antara perusahaan dengan pihak pemerintah atau politik.

## **B. Studi Penelitian Terdahulu**

Untuk memperkuat landasan teori yang ada, peneliti menilai perlu adanya penelitian terdahulu sebagai pendukung hasil penelitian ini. Terkait dengan *tax avoidance*, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

Darwis (2019) dalam penelitiannya tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin besar pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Proporsi komisaris independen pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena proporsi yang lebih banyak dalam dewan komisaris tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan dapat berjalan baik sesuai tujuan perusahaan. Penelitian Darwis (2019)

menunjukkan bahwa komite audit, kualitas audit dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi hubungan politik yang terdapat pada perusahaan maka semakin kecil perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Fadila & Rasuli (2017) dalam penelitiannya tentang Pengaruh *Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwa *return on asset*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. *Leverage* pada penelitian ini berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karena semakin tinggi atau rendahnya tingkat *leverage* pada suatu perusahaan tidak dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya penghindaran pajak pada perusahaan tersebut. Hasil pengujian terhadap hipotesis ke enam pada penelitian ini menunjukkan juga bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena semakin besar atau kecilnya tingkat koneksi politik pada suatu perusahaan tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya penghindaran pajak pada perusahaan tersebut.

Putra (2019) dalam penelitiannya tentang Pengaruh *Corporate Risk, Koneksi Politik Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI. Hasil penelitian ini adalah: *corporate risk*

berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini disebabkan jika risiko suatu perusahaan tinggi maka dapat memberikan peluang untuk melakukan *tax avoidance*. koneksi politik pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena koneksi politik tidak menjadi faktor utama perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditemukan bahwa H0 diterima yang artinya variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena semakin tinggi atau rendahnya tingkat leverage yang diukur menggunakan *debt asset ratio* tidak memiliki pengaruh dari tinggi atau rendahnya *tax avoidance*.

Wulansari & Dewi (2017) dalam penelitiannya tentang Pengaruh kepemilikan Instutional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. Hasil penelitian ini adalah: leverage dan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, hal ini dibuktikan bahwa setiap perusahaan selama tahun pengamatan telah memenuhi syarat dari BAPEPAM yaitu keanggotaan sekurang-kurangnya 3. Kepemilikan institusional, konservatisme akuntansi dan pertumbuhan penjualan juga berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak, besar presentasi kepemilikan institusional perusahaan sampel sebesar 73,46%. Presentase yang cukup besar yang dimiliki

kepemilikan institusional namun didalam perusahaan tidak mampu menjadi *controller* atas kegiatan penghindaran pajak.

Ningsing & Mildawati (2017) dalam penelitiannya tentang Pengaruh *Conporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014. Hasil penelitian ini adalah: kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena kepemilikan publik adalah kepemilikan minoritas. Hasil yang sama juga terdapat pada variabel kepemilikan manajerial, yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena kepemilikan manajerial yang relatif kecil. Proporsi dewan komisaris pada penelitian ini juga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang artinya bahwa penambahan atau penempatan anggota dewan komisaris independen hanya sekedar memenuhi ketentuan formal dan tidak semua dewan komisaris independen dapat menunjukan independensinya. Variabel komite audit dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena keuangan komite audit dapat memperngaruhi keputusan setiap perusahaan.

Ayu *et al* (2015) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Insentif Eksekutif, *Conporate Risk* Dan *Corporate Governance* Pada *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. Hasilnya dari penelitian ini adalah: kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena semakin tinggi kualitas audit maka semakin tinggi risiko dari penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh

suatu perusahaan. Variabel kepemilikan institusional pada penelitian ini memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karena kepemilikan institusional belum tentu mampu memberikan control pada manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Komisaris independen, komite audit dan *corporate risk* pada penelitian ini juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Corporate risk* pada penelitian ini berpengaruh negatif, karena perusahaan yang memiliki risiko tinggi akan menyajikan laporan keuangan apa adanya yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kinerja dari perusahaan tersebut.

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Darwis Tahun 2019	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Kepemilikan Instusional Dan Komite Audit Berpengaruh positif Terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan Variabel Komisi Independen, Kualits Audit Dan Koneksi Politik Tidak Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.
Fadila& Rasuli Tahun 2017	Pengaruh <i>Return On Asset, Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak.	Variabel <i>Return On Asset</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan Variabel

		<i>leverage</i> dan Koneksi Politik berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.
Putra Tahun 2019	Pengaruh <i>Corporate Risk</i> , Koneksi Politik Dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Variabel <i>Corporate Risk</i> Berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan Variabel Koneksi Politik Dan <i>Leverage</i> Tidak Berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
Wulansari & Dewi Tahun 2017	Pengaruh kepemilikan Instutional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan Dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak.	Variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Variabel kepemilikan instutional, proporsi dewan komisaris, <i>leverage</i> , komite audit dan Konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Ningsing & Mildawati, Tahun 2017	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.	Variabel komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Variabel Kepemilikan manajerial, kepemilikan public dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Ayu <i>et al.</i> , Tahun 2015	Pengaruh Insentif Eksekutif, Conporate Risk Dan Conporate Governance Pada <i>Tax Avoidance</i> .	Variabel kualitas audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan Variabel Insentif eksekutif, Conforate risk, kepemilikan instituonal, komisaris independen dan

		komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
--	--	--

Sumber: berbagai literature penelitian

### C. Kerangka Pemikiran

#### 1. Pengaruh Insentif Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*

Sikap adalah salah satu faktor dalam diri seseorang yang bertujuan untuk memberikan respon positif atau negatif pada penilaian terhadap sesuatu yang diberikan. Seseorang yang menganggap sesuatu dapat bermanfaat bagi dirinya maka dapat memberikan respon positif terhadapnya. Hal ini dijelaskan didalam *theory of planned behavior* oleh Ajzen, 1991 dimana setiap individu akan melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau dengan kata lain teori ini menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan rencana dan niat untuk berperilaku. Berdasarkan hal tersebut, eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan dapat membuat kebijakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) jika mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut.

Sistem kompensasi yang tidak berbasis saham di perusahaan-perusahaan Negara Indonesia namun saat ini masih kurang efektif dalam hal memotivasi eksekutif untuk melakukan penghindaran pajak. Sehingga kompensasi yang diberikan untuk eksekutif belum mampu membuat eksekutif meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan perusahaan. Hasil ini memperkuat penelitian (Ayu *et al.*, 2015), Jumlah insentif yang didalamnya terdapat gaji, bonus, tunjangan dan



bayaran lainya yang diterima eksekutif tidak mempengaruhi perusahaan untuk dapat melakukan penghindaran pajak.

## **2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance***

Struktur kepemilikan saham dalam perusahaan publik dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu pemegang saham institusi, pemegang saham perorangan. Kepemilikan saham manajerial termasuk dalam pemegang saham yang dimiliki oleh ekskutif atau direktur dengan demikian masuk dalam kategori pemegang saham perorangan kepemilikan institusional merupakan presentasi saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan blockholder, yaitu kepemilikan atas nama perorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial.

Besar kecilnya kepemilikan institusional dapat mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak dengan cara agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga besarnya konsentrasi *short-term shareholder* institusional dapat meningkatkan penghindaran pajak, akan tetapi semakin besar *short-term shareholder* dapat mengurangi kebijakan penghindaran pajak (Khurata,2019). pada penelitian Darwis (2019) menyatakan bahwa Kepemilikan instusional berpengaruh terhadap tax avoidance karena (semakin tinggi kepemilikan institutional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan).

### 3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen adalah anggota komisaris dari luar perusahaan, yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Komisaris independen bertugas mengawasi kinerja dewan komisaris maupun direksi dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan (Innocent & Gloria, 2018).

Keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan kinerja manajemen karena semakin besar proporsi dari komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan pada pihak manajemen. Menurut penelitian Darwis (2019) komisaris independen diindikasikan berperan sebagai pihak ketiga dimana artinya berada diposisi netral antara pemerintah dan manajemen serta berperan aktif dalam penentuan kebijakan yang bisa dikatakan independen sehingga para investor percaya terhadap manajemen perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung dari hasil penelitian Pramudito dan sari (2015).

Hasil penelitian yang sama juga telah dilakukan oleh Ningsing & Mildawati (2017) menyatakan bahwa dengan jumlah komisaris independen yang semakin banyak akan meningkatkan pengawasan pada kinerja manajer yang lebih baik. Pusat kesuksesan perusahaan terletak pada peran komisaris independen karena dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing dari perusahaan. Dengan terdapatnya fungsi

dari komisaris independen dapat mengurangi kemungkinan eksekutif yang lain untuk melakukan manipulasi laba.

#### **4. Pengaruh *Corporate Risk* terhadap *Tax Avoidance***

Tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan tentu melalui kebijakan yang diambil oleh eksekutif atau pemimpin didalam perusahaan itu sendiri. Dimana pemimpin tersebut berperan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan terhadap perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda. Seorang pemimpin perusahaan bisa menjadi risk averse atau risk taker yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman & Setiyono, 2012).

Dalam perusahaan manajemen yang memiliki *risk taker* dapat mengukur resiko secara intuitif dan berani namun spekulatif. Resiko perusahaan yang tinggi tentunya dapat memberikan peluang perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini juga didukung oleh penelitian Putra (2019) bahwa Tingkat karakteristik eksekutif yang terdapat dalam perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* terutama jika dalam perusahaan terdapat top manajemen yang mempunyai jiwa *risk taker* akan meningkatkan kegiatan penghindaran pajak perusahaan, sehingga nilai CETR mengalami penurunan.

#### **5. Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance***

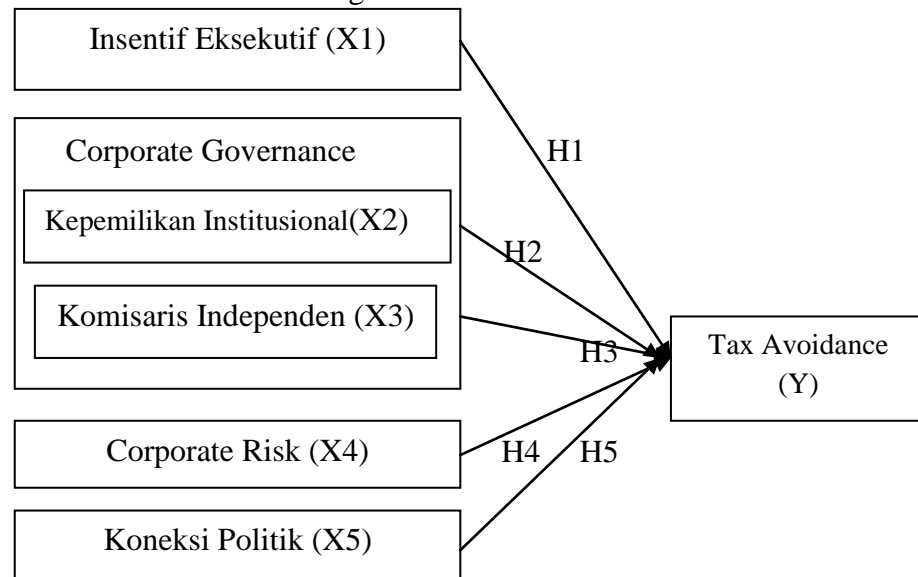
Koneksi politik merupakan hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Menurut Faccio (2006),

perusahaan yang dianggap memiliki koneksi politik jika terdapat salah satu dari pemegang saham besar atau salah satu pimpinan perusahaan baik itu CEO, presiden, wakil presiden maupun sekretaris adalah anggota parlemen, menteri atau orang yang berkaitan dengan politikus.

Koneksi politik yang dimiliki perusahaan dapat membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, salah satunya dapat memudahkan untuk memperoleh pinjaman modal dan pemeriksaan pajak lebih rendah.

Perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki pemerintah ditetapkan sebagai wajib pajak yang rendah resikonya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. Perusahaan dengan kepemilikan atas pemerintah yang berperan sebagai principal yaitu BUMN / BUMD dianggap sebagai perusahaan yang mematuhi peraturan dalam hal perpajakan, karena nama yang dipegang sebagai Badan Usaha Milik Negara mencerminkan sikap yang patuh terhadap peraturan-peraturan yang sudah ditentukan dan tidak akan menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak yang akan mencoreng nama lembaga pemerintahan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwati dan Sugiyarti (2017) yang menunjukkan bahwa variabel koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (Darwis, 2019).

Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran



#### D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang mampu untuk diuji. Hubungan tersebut dapat diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang telah ditetapkan dalam kerangka pemikiran yang dirumuskan untuk study penelitian (Sekaran, 2011: 135). Dalam penelitian ini yang menjadi hipotesis adalah sebagai berikut :

H1 : Insentif Eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

H3 : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

H4 :Corporate Risk berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

H5 :Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pemilihan Metode**

Pemilihan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menekankan pada pengumpulan data kuantitatif yang berusaha menguji hipotesis dengan alat analisis statistic mengenai pengaruh insentif eksekutif, *corporate governance*, *coporate risk* dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*.

##### **B. Teknik Pengambilan Sampel**

###### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019.

###### **2. Sampel**

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* diterapkan karena peneliti memiliki kriteria sampel tertentu yang disesuaikan dengan tujuan dari penelitian. kriteria pengambilan sampel sebagai berikut :

- a. Perusahaan BUMN yang terdapat di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut selama periode 2015-2019.
- b. Perusahaan BUMN yang menerbitkan laporan tahunan selama 5 tahun berturut-turut (tahun 2015-2019).

- c. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data yang diperlukan untuk penelitian selama periode 2015-2019.

**Tabel 3.1**

**Tahapan Seleksi Sampel Penelitian dengan Kriteria**

No	Keterangan	Jumlah
1	Total perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2015-2019.	625
2	Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI secara berturut-turut selama periode 2015-2019.	20
3	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data selama periode 2015-2019.	(0)
Perusahaan yang menjadi sampel penelitian		20
Tahun penelitian		5
Jumlah sampel total selama periode penelitian		100

*Sumber : data sekunder yang diperoleh*

Berdasarkan kriteria diatas, maka jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 20 perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI dengan periode pengamatan selama lima tahun (2015-2019). Sehingga total sampel penelitian sebanyak 100 sampel.

**Tabel 3.2**

**Daftar Nama Perusahaan BUMN**

No	Kode	Nama Perusahaan
1	INAF	PT Indofarma (Persero) Tbk
2	KAEF	PT Kimia Farma (Persero) Tbk
3	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
4	KRAS	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
5	ADHI	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
6	PTPP	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
7	WIKA	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
8	WSKT	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
9	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk



10	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
11	BBTN	PT Tabungan Negara (Persero) Tbk
12	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
13	ANTM	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
14	PTBA	PT Bukit Asam (Persero) Tbk
15	TINS	PT Timah (Persero) Tbk
16	SMGR	PT Semen Indonesia / Semen Gresik (Persero) Tbk
17	JSMR	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
18	GIAA	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
19	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
20	SMBR	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

### C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

#### 1. Definisi Konseptual

##### a. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam suatu penelitian atau variabel ini dijadikan sebagai faktor utama yang berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2011:116). Dalam penelitian ini variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

##### b. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen yang meliputi pengaruh positif maupun negative (Sekaran, 2011:117). Variabel independen dalam penelitian ini adalah insentif eksekutif, corporate governance (yang meliputi kepemilikan institusional dan komisaris independen), corporate risk dan koneksi politik.

## 2. Operasional Variabel

### a. *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak dapat diukur dengan berbagai pendekatan salah satunya Current ETR. Dalam penelitian ini menggunakan perhitungan yang telah dilakukan oleh Hanlon dan Heitzman (2010) dengan menggunakan proksi *current effective tax rate* atau *Current ETR* yaitu mengurangi beban pajak perusahaan dengan cara menggunakan ketentuan yang diperbolehkan atau memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan dan menggunakan celah yang ada didalam *grey area*. Dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### b. *Insentif Eksekutif*

Dalam penelitian Ayu *et al*(2015) menyatakan bahwa variable terikat dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan total dari kompensasi yang mencakup jumlah gaji, tunjangan, bonus dan pembayaran yang diterima eksekutif dibagi dengan jumlah penjualan perusahaan dalam waktu setahun.

$$\text{Insentif Eksekutif} = \frac{\text{Total Kompensasi}}{\text{Jumlah Penjualan Setahun}}$$

### c. Kepemilikan institusional

Besarnya tingkat kepemilikan saham pihak institusional dapat menentukan besarnya tingkat pengawasan terhadap pihak manajemen. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor, pemerintah, debitur, perusahaan asuransi, maupun perusahaan investasi kecuali kepemilikan yang bersifat individual (Khurana dan Moser, 2009).

Kepemilikan Institusional Kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham yang dimiliki pada akhir tahun yang dinyatakan dalam presentase.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham Yang Dimiliki Institusional}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$

### d. Komisaris Independen

Komisaris independen diukur sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2016). Jumlah anggota dewan komisaris dan komisaris independen dapat dilihat pada Laporan Keuangan yang telah diaudit bagian Informasi Umum Perusahaan atau di Laporan Tahunan perusahaan pada bagian Tata Kelola Perusahaan bagian struktur dewan komisaris.

$$\text{KOMIND} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$$

**e. *Corporate Risk***

Resiko perusahaan dapat diukur dengan cara menghitung standar deviasi dari EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization) dibagi dengan total aset perusahaan.

$$Risk = \sqrt{\sum_{T=1}^T (E - \frac{1}{T} \sum_{T=1}^T E)^2 / (T - 1)}$$

**f. *Koneksi politik***

Perusahaan yang dapat dikatakan terkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai hubungan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan pemerintah atau politisi (dharma dan Ardiana :2016). Dalam penelitian ini untuk dapat menentukan perusahaan memiliki koneksi politik dapat dilihat dari 3 kategori :

1. Perusahaan adalah BUMN atau BUMD yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Direktur, komisaris, dewan direksi dan komite audit di perusahaan adalah politisi yang beraktifitas dengan partai politik.
3. Direktur, komisaris, dewan direksi dan komite audit di perusahaan adalah pejabat pemerintah dalam periode saat ini maupun periode sebelumnya.

Dalam menentukan perusahaan yang memiliki koneksi politik digunakan variable dummy yaitu dengan cara memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang didalamnya memenuhi indikator dan kriteria diatas dan 0 jika tidak memenuhi indikator maupun kriteria diatas.

Table 3.2  
Operasional variable

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Tax Avoidance (Y)	Besarnya jumlah pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan	$CETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$	Rasio
Insentif Eksekutif (X <sub>1</sub> )	Besarnya kompensasi yang dimiliki eksekutif	Insentif Eksekutif = $\frac{\text{Total Kompensasi}}{\text{Jumlah Penjualan Setahun}}$	Rasio
Kepemilikan Institusional (X <sub>2</sub> )	Besarnya saham dari institusional	Kepemilikan Institusional = $\frac{\text{Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$	Rasio
Komisaris Independen (X <sub>3</sub> )	Mengetahui jumlah dari komisaris independen pada perusahaan	$KOMIND = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$	Rasio
Resiko Perusahaan (X <sub>4</sub> )	Besarnya penyimbangan atau deviasi standar dari		Rasio

	<i>earning</i>	$Risk \sqrt{\sum_{T-1}^T (E - \frac{1}{T} \sum_{T-1}^T E)^2 / (T - 1)}$	
Koneksi Politik (X <sub>s</sub> )	Mengetahui perusahaan mempunyai koneksi politik atau tidak	Perusahaan berkoneksi politik = 1 Perusahaan tidak terkoneksi politik = 0	Nominal

#### D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dari penelitian ini adalah teknik dokumentasi dengan cara melihat laporan keuangan dan laporan tahunan (*annual report*) perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Website resmi perusahaan sampel dan dengan cara mempelajari literature yang berkaitan dengan permasalahan peneliti baik melalui media cetak maupun media elektronik.

#### E. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan penghitungan komputerisasi dengan program SPSS 23.

#### F. Analisis Data dan Uji Hipotesis

Metode analisis data dan uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistic deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji koefisien regresi.

##### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan penyajian data yang dilakukan secara numerik. Statistik deskriptif meliputi rata-rata (mean), standar

deviasi, range, nilai maksimum, nilai minimum dan jumlah data penelitian. Apabila nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi maka kualitas data adalah baik.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan dengan tujuan agar dapat mengetahui dan melakukan pengujian atas data sekunder ini, maka agar dapat memenuhi syarat yang ditentukan sebelum dilakukan uji hipotesis maka perlu dilakukan beberapa pengujian asumsi klasik yang digunakan yaitu uji autokorelasi, uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

### a. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji pengaruh dari observasi periode sebelumnya terhadap observasi periode yang akan datang. Adanya uji autokorelasi karena observasi muncul berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi baik adalah regresi yang bebas auto korelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *Durbin-Watson* (uji DW). Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut :

$H_0$  : tidak ada auto korelasi ( $r = 0$ )

$H_a$  : ada autokorelasi ( $r \neq 0$ )

Pengambilan keputusan perlu adanya tindakan autokorelasi berdasarkan tabel uji autokorelasi sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Uji Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dI$
Tidak ada autokorelasi positif	No desicision	$dI \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negative	Tolak	$4 - dI < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negative	No desicision	$4 - du \leq d \leq 4 dI$
Tidak ada autokorelasi	Tidak ditolak	$Du < d < 4 - du$
Positif atau negative		

Sumber: (Imam Ghozali,2016:108)

b. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali,2016:154).

Model regresi yang baik adalah berdsitribusi normal atau mendekati normal.Apabila variabel tidak berdistribusi secara normal maka memungkinkan hasil dari uji statistic mengalami penurunan. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistic one simple kolmogoror smirnov test yaitu dengan ketentuan jika nilai signifikan diatas 0,05 (5%) maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil one simple kolmogoror smirnov test menunjukan nilai signifikan dibawah 0,05 (5%) maka data tersebut terdistribusi normal.

c. Uji Multikolinearitas



Uji Multikorelasi adalah pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Tujuan lagi dari uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak dalam model regresi dengan melihat nilai tolerance dan *Varlance Inflation Factor* (VIF) (Ghozali,2016;103). Seperti berikut ini:

- 1) Apabila nilai tolerance di bawah 0,1 dan nilai VIF di atas 10, maka model regresi mengalami masalah multikolinearitas.
- 2) Apabila nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, maka model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas.

d. Uji Hateroskedastisitas

Uji Hateroskedastisitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Hateroskedastisitas(Ghozali,2016:134).

Uji Hateroskedastisitas juga digunakan untuk menguji adanya Hateroskedastisitas yang dilakukan dengan menggunakan uji rank sperman. Jika variabel independen signifikan secara persial mempengaruhi variabel dependen maka adanya indikasi terjadi Hateroskedastisitas. Hal ini apabila adanya profitabilitas signifikan diatas tingkat kepercayaan 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Hateroskedastisitas.

### 3. Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk dapat mengetahui pengaruh dari variabel bebas dengan variabel terikat digunakan model regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

Y : Tax Avoidance

$\alpha$  : Konsistensi

$\beta_1\beta_2\beta_3\beta_4\beta_5$  : Koefisien Regresi

$X_1$  : Insentif Eksekutif

$X_2$  : Kepemilikan Institusional

$X_3$  : Komisaris Independen

$X_4$  : Corporate Risk

$X_5$  : Koneksi Politik

e : Error

### 4. Uji Koefisien Regresi

#### a. Uji Koefisien Regresi Secara Individual (Uji t)

Uji t digunakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai profitabilitas signifikan lebih kecil dari 0,025 maka suatu variabel independen menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel

dependen. Hipotesis diterima jika hasil nilai signifikan ( $\alpha$ )  $> 0,025$  dan hipotesis ditolak jika nilai signifikan ( $\alpha$ )  $< 0,025$ .

b. Koefisien Determinan (Adjusted  $R^2$ )

Uji Adjusted  $R^2$  dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen.  $R$  sendiri digunakan untuk ketepatan yang paling baik dari analisis regresi linear berganda. Koefisien determinan (Adjusted  $R^2$ ) berkisar diantara angka 0 sampai angka 1. Jika  $R^2$  mendekati satu (1) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap dependen. Dan sebaliknya jika  $R^2$  mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variabel independen menerangkan variabel dependen.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Bursa Efek Indonesia (BEI)**

Secara historis, Pasar modal hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek hadir sejak jaman kolonial Belanda tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda yang bertujuan untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.

Pertumbuhan dan perkembangan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, meskipun pasar modal telah ada dari tahun 1912. Hal ini disebabkan beberapa periode kegiatan pasar modal yang sempat mengalami kevakuman, karena terdapat beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Indonesia dan adanya beberapa kondisi yang menyebabkan operasi dari bursa efek tidak dapat berjalan seperti apa yang diharapkan.

Pasar modal kembali diaktifkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1977. Beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami perkembangan seiring dengan regulasi dan berbagai insentif yang dikeluarkan pemerintah.

Singkatnya, pertumbuhan dan perkembangan pasar modal dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
Perkembangan Pasa Modal di Indonesia

Desember 1912	Pasar modal/Bursa Efek di Indonesia dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda di Batavia
1914-1918	Pasar modal di Batavia ditutup selama Perang dunia I
1925-1942	Pasar modal di Jakarta dibuka kembali bersama dengan pasar modal di Surabaya dan Semarang
1939	Pasar modal di Surabaya dan Semarang ditutup kembali karena isu politik (Perang Dunia II)
1942-1952	Pasar modal di Jakarta ditutup kembali selama adanya perang dunia II
1956	Pasar modal semakin tidak aktif karena adanya program nasionalisasi perusahaan Belanda.
1956-1977	Perdagangan di pasar modal/ Bursa Efek vakum
10 Agustus 1977	Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto,
1987	Ditandai dengan hadirnya paket Desember 1987 yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan penambahan modal dari investor asing di Indonesia.
1988-1990	Paket deregulasi dibidang pasar modal dan perbankan diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa meningkat.
2 Juni 1988	Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE).
Desember 1988	Pemerintah Indonesia mengeluarkan paket Desember 88 (PAKDES 88) yang memberikan perusahaan untuk go public dan

	beberapa kebijakan positif untuk perkembangan pasar modal.
16 Juni 1989	Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh perseroan terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.
13 Juli 1992	Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ.
22 Mei 1995	Sistem otomasi perdagangan di BEJ dilakukan dengan sistem computer JATS.
10 November 1995	Pemerintah mengeluarkan UU No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal.
1995	Bursa parallel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya.
2000	Sistem perdagangan mulai dipublikasikan di pasar modal Indonesia.
2002	BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh.
2007	Penggabungan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES) menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).
02 Maret 2009	Peluncuran perdana sistem perdagangan baru bursa efek Indonesia JATS-NextG.

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

## 2. Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia

### Visi

Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia.

### Misi

Menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaraanya perdagangan efek yang teratur, wajar dann efisien serta mudah diakses

oleh seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders).

### **3. Sejarah Umum Perusahaan BUMN**

#### **a. PT Indofarma (Persero) Tbk**

PT Indonesia Farma (Persero) Tbk yang disingkat Indofarma didirikan pada tanggal 2 Januari 1996 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1983. Kantor pusat dari PT Indofarma terletak di Jalan Indofarma No,1, Cibitung, Bekasi. PT Indofarma sebelumnya merupakan sebuah pabrik obat yang didirikan pada tahun 1918 yang bernama pabrik obat manggarai.

Tahun 1950 pabrik obat manggarai diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dan dikelola oleh departemen kesehatan. Kemudian pada tahun 1979, nama perusahaan obat ini diubah menjadi pusat produksi farmasi departemen kesehatan. Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No.20 tahun 1981, pemerintah Republik Indonesia menetapkan pusat produksi farmasi departemen kesehatan menjadi perseroan umum Indonesia farma. Tahun 1996, status badan hukum perum Indofarma kemudian diubah menjadi perusahaan (persero).

#### **b. PT Kimia Farma (Persero) Tbk**

PT Kimia Farma Tbk merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia, didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Nama perusahaan PT Kimia Farma Tbk sebelumnya adalah *NV Chemicalien Handle Rathkamp and Co.*

Tahun 1958 pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan perusahaan farmasi menjadi PNF (Perusahaan Negara Farmasi) Bhineka Kimia Farma. Pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas.

c. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

PT Perusahaan Gas Negara merupakan perusahaan nasional Indonesia terbesar dalam bidang transportasi dan distribusi gas bumi yang memiliki peran besar dalam pemenuhan gas bumi domestik. PT Perusahaan Gas Negara diresmikan sebagai perusahaan Negara pada tanggal 13 Mei 1965 dan PGN (Perusahaan Gas Negara) telah dimulai beroperasi sejak era kolonial. Pada tahun 1994 ekspansi PGN diikuti pembentukan anak usaha dari PT Transportasi Gas Indonesia, saham dari PT Perusahaan Gas Negara mulai dicatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan kode PGAS pada tanggal 15 Desember 2003.

d. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

PT Krakatau Steel adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang produksi baja, perusahaan Krakatau dibentuk pada tanggal 20 Mei 1962. Sebelumnya, nama perusahaan dari PT Krakatau steel adalah Cilegol Steel Mill yang resmi berdiri dengan kerjasama *Tjazzpromexport* dari Uni Soviet. Namun Terjadinya isu ekonomi dan politik mengakibatkan pembangunan sempat terhenti. Memasuki Tahun 1970 melanjutkan pembangunan



dari unit perusahaan dan dioprasikan secara resmi pada tanggal 31 Agustus 1970 dengan nama Krakatau Steel.

e. PT Adhi Karya (Persero) Tbk

PT Adhi Karya (Persero) Tbk didirikan pada tanggal 1 Juni 1974, memulai usahanya secara komersial pada tahun 1960. Kantor pusat dari PT Adhi Karya berada di Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18, Jakarta 12510 - Indonesia. Sejarah dari PT Adhi Karya berawal ketika Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik melalui surat keputusan pada tanggal 11 Maret 1960 memutuskan mendirikan perusahaan jasa konstruksi, kemudian pada Tahun 1961 PT Adhi Karya disahkan menjadi Perusahaan Negara (P.N).

f. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau dikenal dengan nama PP (Persero) Tbk didirikan pada tanggal 26 Agustus 1953 dengan nama NV Pembangunan perumahan, yang merupakan hasil peleburan suatu perusahaan bangunan bekas yang dimiliki bank industri Negara ke dalam bank pembangunan Indonesia. Pada tanggal 29 Maret 1961 diakui menjadi perusahaan Negara, berkantor pusat Jl. Letjend TB Simatupang No.57, Pasar Rebo Jakarta Timur 13760 Indonesia.

g. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk didirikan pada tanggal 29 Maret 1961 dengan nama perusahaan Negara widjaja karya yang

mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1961. Kantor pusat perusahaan wijaya karya berada di jl. D.I Panjaitan Kav.9, Jakarta Timur 13340 dengan lokasi utama di seluruh Indonesia dan luar negeri. Perusahaan bangunan bekas milik Belanda yang bernama *Naamloze Vennotschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedrij Vis en Co*, dilebur ke dalam perusahaan Negara Widjaja Karja dan dinyatakan bubar pada tanggal 22 Juli 1971. Sehingga dialihkan menjadi perusahaan perseroan.

h. PT Waskita Karya (Persero) Tbk

PT Waskita Karya (Persero) Tbk didirikan pada tanggal 1 Januari 1961, dari perusahaan asing yang bernama *Volker Aenemings Maatschappij NV*. Kemudian dinasionalisasi pemerintah menjadi Perusahaan Negara Waskita Karya. Kantor pusat Wasita Karya beralamat di Gedung Waskita Jln. M.T. Haryono Kav. No. 10 Cawang Jakarta 13340 – Indonesia.

i. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 1968 BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. BNI memberikan fasilitas pinjaman dan layanan penyimpanan, baik

pada segmen korporasi, menengah, maupun kecil.

j. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank tertua di Indonesia, yang didirikan oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* di Purwokerto. Pada tahun 1948 kegiatan BRI sempat terhenti, kemudian operasional BRI baru mulai aktif setelah adanya perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.

Pada tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan peraturan pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Pada tahun 2003 pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank BRI, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

k. PT Tabungan Negara (Persero) Tbk

Bank tabungan Negara didirikan pada tanggal 9 Februari 1950 dengan nama Bank Tabungan Pos. Kantor pusat bank BTN berlokasi di Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130 – Indonesia. Berdasarkan anggaran umum perusahaan, tujuan dari Bank BTN antara lain untuk menjalankan kegiatan umum perbankan termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip

syariah sejak 14 Februari 2005.

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Bank mandiri didirikan di Indonesia pada tanggal 2 oktober 1998. Pada saat itu, pemerintah Indonesia sedang berusaha menanggulangi krisis ekonomi regional sejak tahun 1997. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan restrukturisasi bank, baik bank umum maupun swasta. Bank mandiri juga mengalami restrukturasi, dari empat bank pemerintah digabungkan dalam satu bank. Penggabungan empat bank tersebut dengan bank mandiri akhirnya dilakukan pada tahun 1999.

m. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

PT Aneka Tambang didirikan dengan nama PN Aneka Tambang pada tanggal 5 Juli 1968. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan ANTM adalah pada bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian dan menjalankan usaha pada bidang industri, perdagangan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan galian tersebut.

Kegiatan utama pada PT Aneka Tambang adalah meliputi bidang eksplorasi, eksploitasi, pemurnian serta pemasaran bijih nikel, feronikel, perak, emas dan batubara. Tahun 2014, perusahaan mulai menjual komoditas baru *chemical grade alumina*. Seiring mulai beroperasinya *chemical grade alumina* PT Aneka Tambang

juga mengembangkan bisnis pembangkit listrik.

n. PT Bukit Asam (Persero) Tbk

PT Bukit Asam didirikan pada tanggal 2 Maret 1981, pada tahun 1993 PT Bukit Asam ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan satuan kerja pengusaha briket. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan PT Bukit Asam, ruang lingkup kegiatannya adalah bergerak pada bidang industry tambang batubara, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksploitas, eksprolasi, pemurnian, pengolahan dan perdagangan. Kantor korespondensi terletak di Menara Kadin, Jakarta 12950 – Indonesia.

o. PT Timah (Persero) Tbk

PT Timah sebagai perusahaan perseroan didirikan pada tanggal 2 Agustus 1976, yang merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pertambangan timah. Sejarah pendirian perseroan telah dimulai sejak pengelolaan di bawah pemerintah Belanda, yakni penambangan mineral timah Indonesia yang ditemukan secara tersebar di daratan dan perairan sekitar pulau Bangka, Karimun dan Kundur.

Melalui beberapa anak perusahaanya, saat ini perusahaan PT Timah bergerak dalam beberapa bidang kegiatan usaha. Antara lain bidang usaha penambangan timah dan mineral lainnya, penambangan mineral non-timah, tin chemical, produksi hilirisasi

timah seperti solder dan timah bentuk lainnya. Terakhir adalah bidang usaha berbasis kompetensi seperti sektor konstruksi dan rumah sakit.

p. PT Semen Indonesia / Semen Gresik (Persero) Tbk

PT Semen Indonesia sebelumnya adalah PT Semen Gresik, yang didirikan pada tanggal 25 Maret 1953 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 7 Agustus 1957. Ruang lingkup perusahaan PT Semen Indonesia adalah meliputi berbagai kegiatan industri, jenis semen yang dihasilkan antara lain: *Special Blended Cement*, Semen Portland dan *Oil Well Cement Class G HRC*. Kegiatan utama perusahaan PT Semen Indonesia adalah bergerak pada bidang industri semen, hasil produksi perusahaan dan anak perusahaan PT Semen Indonesia dipasarkan di dalam maupun luar negeri.

q. PT Jasa Marga (Persero) Tbk

PT Jasa Marga didirikan pada tanggal 1 Maret 1978 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1978. Ruang lingkup dari PT Jasa Marga adalah melaksanakan kebijaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Kantor pusat dari PT Jasa Marga di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550 – Indonesia.

Tahun 1987 PT Jasa Marga merupakan satu-satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia yang dalam proses

perkembanganya dibiayai oleh pemerintah Indonesia, dengan dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. PT Jasa Marga merupakan perusahaan yang mendirikan jalan tol pertama di Indonesia yang dioperasikan oleh perseroan, yaitu jalan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi). Jalan tol Jagorawi merupakan tonggak sejarah bagi kemajuan industri jalan tol di tanah air.

r. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Berdirinya PT Garuda Indonesia yaitu bermula sejak presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno mengemukakan idenya di depan sejumlah pedagang besar di Aceh untuk membeli sebuah pesawat Dakota (DC 3) yang bertujuan untuk melanjutkan revolusi kemerdekaan melawan Belanda pada tanggal 16 Juni 1948. Menyikapi ide dari Presiden, sebagian besar pedagang menyumbangkan dananya hingga mencapai total 130.000 Strait Dollar dan 20 kg emas yang kemudian digunakan untuk membeli pesawat.

Penerbangan perdana dilakukan dari Yogyakarta menuju Jakarta pada tanggal 26 Januari 1949, yang kemudian di peringati sebagai hari jadi Garuda Indonesia pada tahun 1985, pimpinan GIA yang baru yakni R.A.J Lumenta melakukan re-branding terhadap maskapai dengan merubah nama Garuda Indonesia Airways menjadi Garuda Indonesia. Pada tahun yang sama, Lumenta memindahkan pangkalan utama maskapai yang sebelumnya berada

di bandara kemayoran dan Bandar udara Halim Perdanakusuma dipindahkan ke Bandara Soekarno Hatta untuk penambahan rute.

s. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Pada tahun 1882, berdirinya sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf. Layanan komunikasi ini kemudian dikonsolidasikan oleh pemerintah Hindia Belanda ke dalam jawatan Post Telegraaf Telefoon (PTT). Pada tanggal 23 Oktober 1856, layanan telegraf elektromagnetik mulai beroperasi yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor. Kemudian pada tahun 2009 momen tersebut dijadikan sebagai tahun lahirnya PT Telekomunikasi Indonesia.

Tahun 1961, status jawatan diubah menjadi PN Postel yang artinya Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi. Kemudian pada tahun 1965, PN Postel dipecah menjadi dua bagian, yaitu Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi. Perumtel berubah nama bentuk menjadi PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 1991 sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991.

t. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Pada tanggal 14 November 1974, Perusahaan PT Semen Baturaja lahir dengan nama PT Semen Baturaja (Persero) dengan kepemilikan saham 45% yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia dan PT Semen Padang sebesar 55%. Kemudian tanggal 9



November 1979 perusahaan berubah status dari penanaman modal dalam negeri menjadi persero dengan komposisi saham sebesar 88% dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya perseroan terus mengalami perkembangan sehingga pada tanggal 14 Maret 2013 PT Semen Baturaja mengalami perubahan status menjadi perseroan terbuka dan mengubah nama menjadi PT Semen Baturaja (Perser) Tbk.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Analisis Hasil Penelitian**

#### **a. Analisis Statistis deskriptip**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis statistik deskriptif, penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang konsisi perusahaan dalam analisis

Tabel 4.2

#### Statistik Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	100	.00618	1.09169	.2800779	.21525143
IE	100	.00008	1.09156	.1080721	.20508847
KI	100	.00066	.94476	.5356154	.27702453
KIN	100	.00000	.66666	.4026824	.11630270
CR	100	.00006	1.02787	.1016513	.13296502
KP	100	0	1	.50	.503
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Olah SPSS Versi 23

Berdasarkan tabel 4.2 hasil analisis statistik deskriptif yang telah diolah sebagai berikut:

- a. Nilai *mean* dan standar deviasi yang dimiliki variabel *tax avoidance* adalah 0,2800779 dan 0,21525143. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya, hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel *tax avoidance* dalam penelitian ini baik.
- b. Nilai *mean* dan standar deviasi yang dimiliki variabel insentif eksekutif adalah 0,1080721 dan 0,20508847. Nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasinya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dari variabel insentif eksekutif dalam penelitian ini cukup baik, sebab nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasinya.
- c. Nilai *mean* dan standar deviasi yang dimiliki variabel kepemilikan institusional adalah 0,5356154 dan 0,27702453. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya, hal ini menunjukkan bahwa kualitas dari variabel kepemilikan institusional dalam penelitian ini baik.
- d. Nilai *mean* dan standar deviasi yang dimiliki variabel komisaris independen adalah 0,4026824 dan 0,11630270. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya, hal ini menunjukkan bahwa kualitas dari variabel komisaris independen dalam penelitian ini baik.
- e. Nilai *mean* dan standar deviasi yang dimiliki variabel *corporate risk* adalah 0,1016513 dan 0,13296502. Nilai rata-rata lebih kecil dari standar deviasinya, hal ini menunjukkan bahwa kualitas dari variabel *corporate risk* dalam penelitian ini cukup baik.

- f. Nilai mean dan standar deviasi yang dimiliki variabel koneksi politik adalah 0,50 dan 0,503. Nilai rata-rata lebih kecil dari standar deviasinya, hal ini menunjukkan bahwa kualitas dari variabel koneksi politik dalam penelitian ini cukup baik.

### C. Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik *Monte carlo test*.

Tabel 4.3  
Uji normalitas

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.21057692
Most Extreme Differences	Absolute		.131
	Positive		.131
	Negative		-.065
Test Statistic			.131
Asymp. Sig. (2-tailed)			.000 <sup>c</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.056 <sup>d</sup>
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.050
		Upper Bound	.062

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

Sumber: Data Olah SPSS Versi 23

Dari hasil tersebut nilai dari Monte Carlo sig ( 2- tailed) sebesar  $0,056 > \text{dari } 0,05$  , dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Uji normalitas Monte Carlo digunakan variabel *Tax Avoidance*, Insentif Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, *Corporate Risk* pada penelitian ini memiliki angka mendekati nol.

## 2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji antara model regresi linier apakah terdapat korelasi antara kesalahan pada pengganggu untuk periode sebelumnya.

Tabel 4.4  
Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>	
Model	Durbin-Watson
1	1.919

a. Predictors: (Constant), KP, KIN, IE, KI, CR

b. Dependent Variable: TA

Untuk melihat terjadinya autokorelasi atau tidak, dapat dilihat melalui pengujian *Durbin-Watson* (DW). Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,919 dengan jumlah variabel independen 5 dan tingkat signifikan 0,05 atau 5% atau  $\alpha = 5\%$ . Variabel independen 5 ( $k=5$ ) dan jumlah sampel  $n = 100$ . Diketahui nilai  $du = 1,7804$  sedangkan nilai  $4-du$  adalah 2,2196. Sehingga berdasarkan pengambilan keputusan  $du < d < 4 - du$  adalah  $1,7804 < 1$ ,

$919 < 4 - 1,7804 (2,2196)$  maka dapat disimpulkan tidak terjadi adanya autokorelasi positif maupun negatif dalam penelitian ini.

### 3. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016).

Tabel 4.5  
Uji Multikolonieritas

Model	Coefficients <sup>a</sup>	
	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
IE	.971	1.029
KI	.981	1.019
KIN	.985	1.015
CR	.953	1.050
KP	.981	1.019

a. Dependent Variable: TA

Sumber: Olah Data SPSS Versi 23

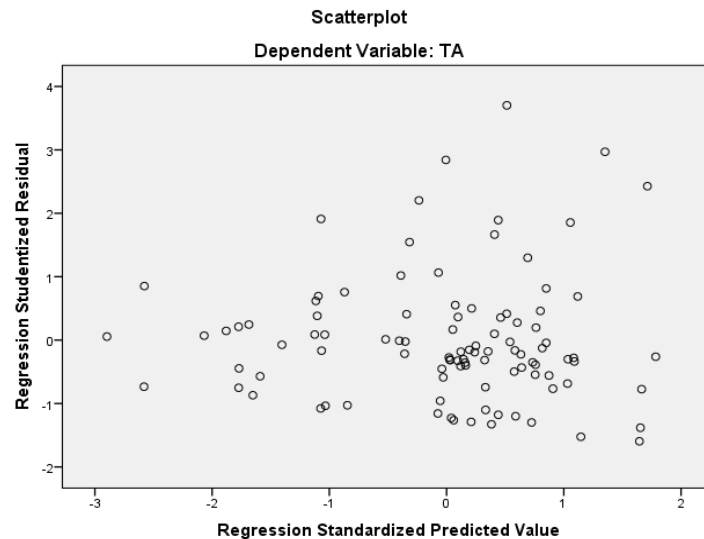
Berdasarkan nilai tolerance dan *VIF* pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa tidak ada faktor yang memiliki nilai tolerance  $\geq 0,10$  atau sama dengan *VIF*  $\leq 10$ . Terlihat bahwa tidak ada hubungan korelasi antara variabel independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ada faktor (insentif eksekutif, kepemilikan institusional, komisaris independen, corporate risk dan koneksi politik) yang menunjukkan hubungan multikolinieritas.

### 4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik merupakan yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat adanya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SPRESID dengan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, sedangkan sumbu X merupakan residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah distudentized.

Dasar analisis ini jika terdapat pola tertentu, semacam titik-titik yang membentuk pola secara teratur (bergelombang, melebur dan menyempit) maka dapat disimpulkan telah terjadi heteroskedastisitas. Namun jika pola yang ada tidak jelas dan terdapat titik-titik yang menyebar dibawah dan diatas angka nol di sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil output dengan menggunakan program SPSS 23 yang berkenaan dengan uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6  
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Olah Data SPSS Versi 23

Pada grafik *scatterplot* tersebut menunjukkan pola titik-titik menyebarkan di bawah serta diatas angka nol (0) pada daerah sumbu Y. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dihasilkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### D. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

##### 1. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Untuk memprediksi nilai dari variabel dependen jika nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam penelitian ini dijelaskan hubungan linier antara variabel insentif

eksekutif, kepemilikan institusional, komisaris independen, *corporate risk* dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

Tabel 4.7

## Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.213	.098		.031
	IE	-.079	.107	-.076	.462
	KI	.140	.079	.180	.081
	KIN	-.010	.188	-.005	.958
	CR	-.083	.167	-.051	.622
	KP	.027	.044	.062	.543

a. Dependent Variable: TA

Sumber: Olah Data SPSS Versi 23

Hasil output SPSS tersebut menunjukkan nilai-nilai yang tertera dalam kolom B yaitu constant 0,213 ; Insentif eksekutif (X1) sebesar -0,079 ; Kepemilikan Institusional (X2) sebesar 0,140 ; Komisaris Independen (X3) sebesar -0,010 ; *Corporate Risk* (X4) sebesar -0,083 ; Koneksi Politik (X5) sebesar 0,27.

Nilai-nilai diatas dapat dibentuk menjadi sebuah persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,213 - 0,079 (X1) + 0,140 (X2) - 0,010 (X3) - 0,083 (X4) + 0,027 (X5) + e$$

Makna persamaan :



- a. Nilai constant sebesar 0,213 bermakna apabila variabel bebas tidak dimasukan ke dalam model regresi maka nilai tingkat penghindaran pajak sebesar 0,213.
- b. Nilai koefisien  $\beta_1$  sebesar -0,079, dapat diartikan bahwa jika insentif eksekutif mengalami kenaikan, maka nilai *tax avoidance* akan mengalami kenaikan sebesar -0,079 dengan asumsi bahwa nilai kepemilikan institusional, komisaris independen, corporate risk dan koneksi politik adalah tetap.
- c. Nilai koefisien  $\beta_2$  sebesar 0,140 bermakna jika kepemilikan institusional mengalami kenaikan, maka nilai *tax avoidance* mengalami penurunan sebesar 0,140 dengan asumsi variabel independen lain tetap.
- d. Nilai koefisien  $\beta_3$  sebesar -0,010 dapat diartikan bahwa jika komisaris independen mengalami kenaikan, maka nilai *tax avoidance* akan mengalami kenaikan sebesar -0,010.
- e. Nilai koefisien  $\beta_4$  sebesar -0,083 dapat diartikan bahwa jika *corporate risk* mengalami kenaikan, maka nilai *tax avoidance* akan mengalami kenaikan sebesar -0,083.
- f. Nilai koefisien  $\beta_5$  sebesar 0,027 dapat diartikan bahwa jika koneksi politik mengalami penurunan, maka nilai *tax avoidance* akan mengalami kenaikan sebesar 0,027.

## 2. Uji Koefisien Regresi

- a. Uji Koefisien Regresi Secara Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh preferensi insentif eksekutif, kepemilikan institusional, komisaris independen, corporate risk dan koneksi politik secara persial terhadap *tax avoidance*.

Tabel 4.8  
Hasil Uji Persial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	T	Sig.
(Constant)	2.185	.031
IE	-.739	.462
KI	1.763	.081
KIN	-.053	.958
CR	-.495	.622
KP	.610	.543

a. Dependent Variable: TA

Sumber: Olah Data SPSS Versi 23

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.8 maka diperoleh interpretasi sebagai berikut:

a. Hasil pengujian hipotesis pertama

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 23 seperti yang terlihat pada tabel 4.8 diatas, hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan nilai signifikansi 0,462 yang lebih besar dari nilai 0,025. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, hal ini menunjukkan bahwa variabel insentif eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

b. Hasil pengujian hipotesis kedua

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 23 seperti yang terlihat pada tabel 4.8 diatas, hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai signifikansi 0,081 yang lebih besar dari nilai 0,025. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

c. Hasil pengujian hipotesis ke tiga

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 23 seperti yang terlihat pada tabel 4.8 diatas, hasil pengujian hipotesis ke tiga menunjukkan nilai signifikansi 0,958 yang lebih besar dari nilai 0,025. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, hal ini menunjukkan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

d. Hasil pengujian hipotesis ke empat

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 23 seperti yang terlihat pada tabel 4.8 diatas, hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan nilai signifikansi 0,622 yang lebih besar dari nilai 0,025. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, hal ini menunjukkan bahwa variabel *corporate risk* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

e. Hasil pengujian hipotesis ke lima

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 23 seperti yang terlihat pada tabel 4.8 diatas, hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan nilai signifikansi 0,543 yang lebih besar dari nilai 0,025. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, hal ini menunjukkan bahwa variabel koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

b. Koefisien Determinan

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Berikut hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 23.

Tabel 4.9  
Koefisien determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.207 <sup>a</sup>	.043	-.008	.21610482

a. Predictors: (Constant), KP, KIN, IE, KI, CR

b. Dependent Variable: TA

Sumber: Olah Data SPSS Versi 23

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh R Square sebesar 0,043 atau 4,3% ini berarti variabel bebas yang terdiri dari insentif eksekutif, kepemilikan institusional, komisaris independen, corporate risk dan koneksi politik secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu *tax avoidance* sebesar - 0,8% dan sisanya sebesar 99,2% dipengaruhi oleh variabel lain

yang tidak masuk dalam penelitian ini.

### C. Pembahasan

Berdasarkan dari hasil perhitungan regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 23 telah dilakukan pengujian hipotesis baik secara persial maupun secara simultan. Pengujian secara simultan dan persial antara variabel independen yaitu insentif eksekutif, kepemilikan institusional, komisaris independen, *corporate risk* dan koneksi politik dengan variabel dependen yaitu *tax avoidance* diperoleh hasil sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh Insentif Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t pada SPSS versi 23, dapat diketahui bahwa nilai t -0,739 dengan nilai signifikan  $0,462 > 0,025$  maka  $H_a$  ditolak dan dapat diartikan bahwa insentif eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa insentif eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena jumlah insentif yang mencakup gaji, tunjangan, bonus dan pembayaran lain yang diterima eksekutif tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* pada penelitian ini. Dengan adanya insentif diharapkan eksekutif memiliki motivasi untuk fokus pada tujuan perusahaan dan menghindari perilaku yang dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan BUMN.

Negara Indonesia tidak memiliki standar khusus untuk

penentuan dari total pemberian insentif terhadap eksekutif, satu perusahaan dengan perusahaan yang lain di Indonesia memiliki perbedaan untuk total pemberian insentif terhadap eksekutif. Jika insentif yang diberikan perusahaan kecil, maka dapat mengakibatkan eksekutif tidak termotivasi dalam pengambilan kebijakan salah satunya dalam kebijakan perpajakan.

Maka dengan demikian, insentif diharapkan mampu menghindari adanya tindakan dari eksekutif untuk melakukan kecurangan yang kaitanya dengan kecurangan terhadap kebijakan pajak perusahaan. Hal ini memperkuat penelitian Ayu *et al* (2015) yang menyimpulkan bahwa insentif eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## 2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t pada SPSS versi 23, dapat diketahui bahwa nilai t 1,763 dengan nilai signifikan  $0,081 > 0,025$  maka  $H_a$  ditolak dan dapat diartikan bahwa insentif eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dalam teori agensi dijelaskan bahwa hubungan antara manajemen dan pemilik saham jika semakin besar saham yang dimiliki pihak institusional, maka dapat menimbulkan pengawasan yang tinggi terhadap perilaku manajemen didalam sebuah perusahaan. Kepemilikan institusional pada penelitian ini memiliki peran yang penting dalam perusahaan, karena besar kepemilikan

saham oleh pihak institusional dapat mengurangi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, sehingga dapat menghindari adanya praktik *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian Wulansari & Dewi (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, pengawasan yang tinggi tentu memiliki tujuan untuk mengurangi perilaku *opportunistic* dari pihak manajemen. Diharapkan pengawasan tersebut mampu mencegah pihak manajemen untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian Darwis (2019) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

### 3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t pada SPSS versi 23, dapat diketahui bahwa nilai t -0,53 dengan nilai signifikan  $0,958 > 0,025$  maka  $H_a$  ditolak dan dapat diartikan bahwa insentif eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

komisaris independen bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap suatu perusahaan dan memastikan bahwa *corporate governance* sudah dilakukan di dalam perusahaan tersebut. Dengan adanya tanggung jawab terhadap kepentingan pemegang saham, diharapkan pihak komisaris independen akan melakukan ketaatan pajak perusahaan

sehingga dapat menghindari adanya praktik *tax avoidance*.

Proporsi dewan komisaris independen perlu menjamin agar mekanisme pengawasan dalam suatu perusahaan berjalan sesuai tujuan perusahaan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilihan dewan komisaris independen juga diambil dari pihak luar, bukan dari pihak yang terafiliasi dan dilakukan secara demokratis dengan tujuan untuk melakukan pengawasan manajemen secara efektif. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen terhadap manajemen perusahaan adalah untuk menghindari adanya tindakan penghindaran pajak. Pada penelitian ini, dewan komisaris memiliki peran untuk mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk menghindari adanya praktik penghindaran pajak dan menurunkan biaya agensi, sehingga membuat praktik *tax avoidance* menurun.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian Wulansari & Dewi (2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### 4. Pengaruh *Corporate Risk* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t pada SPSS versi 23, dapat diketahui bahwa nilai t -0,495 dengan nilai signifikan  $0,622 > 0,025$  maka  $H_a$  ditolak dan dapat diartikan bahwa insentif eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Risiko perusahaan merupakan suatu kondisi dimana



kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyebabkan kinerja dari suatu perusahaan menjadi lebih rendah dari tujuan perusahaan tersebut. Besar kemungkinan karakter eksekutif dalam penelitian ini merupakan *risk averse*, dimana karakter ini tidak berani mengambil risiko yang tinggi. Sehingga dalam pengolahan suatu perusahaan yang kecil adanya risiko tidak memiliki dampak terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh Saputra (2018) yang menjelaskan bahwa *corporate risk* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Putra (2019) yang menyebutkan bahwa *corporate risk* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan yang memiliki top manajemen dan berkarakter *risk taker* dapat meningkatkan perusahaan untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak.

##### 5. Pengaruh Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t pada SPSS versi 23, dapat diketahui bahwa nilai t 0,610 dengan nilai signifikan  $0,543 > 0,025$  maka  $H_a$  ditolak dan dapat diartikan bahwa insentif eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

koneksi politik dan *tax avoidance* tidak memiliki hubungan yang positif dalam penelitian ini, karena perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah ditetapkan

sebagai wajib pajak yang rendah resikonya adanya praktik *tax avoidance*. kedekatan yang dimiliki perusahaan tentunya membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan, hal ini bertujuan untuk tetap mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai wajib pajak yang patuh.

Adanya kedekatan dengan partai tentunya memberikan keuntungan bagi perusahaan, namun perusahaan tentunya harus lebih mengutamakan dampak jangka panjang yang akan ditimbulkan. Baik buruknya citra perusahaan akan berdampak pada kepercayaan masyarakat, karena masyarakat menaruh perhatian serius pada suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi maupun menggunakan produk yang dikeluarkan perusahaan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ayu *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. namun bertolak belakang dengan hasil penelitian (Putra, 2019) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pengujian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Insentif eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karna nilai signifikan variabel insentif eksekutif 0,462 lebih besar dari 0,025.
- b. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karna nilai signifikan variabel kepemilikan institusional 0,081 lebih besar dari 0,025.
- c. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karna nilai signifikan variabel komisaris independen 0,958 lebih besar dari 0,025.
- d. *Corpotae risk* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karna nilai signifikan variabel *corporate risk* 0,622 lebih besar dari 0,025.
- e. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karna nilai signifikan variabel koneksi politik 0,543 lebih besar dari 0,025.

#### B. Saran

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka berikut adalah saran yang dapat bermanfaat pada penelitian selanjutnya:

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk menambah sampel penelitian dengan jenis perusahaan perbankan dan manufaktur,

sehingga dapat memberi perbedaan terhadap variabel yang telah dilakukan dalam penelitian ini dengan perusahaan yang berbeda.

2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk menambah variabel independen seperti CSR dan konservatisme akuntansi.
3. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian, sehingga belum mencakup keseluruhan jenis perusahaan BUMN yang ada. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat mengambil seluruh perusahaan BUMN yang terdapat di Indonesia.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak terpaku dengan kelima variabel independen yang terdapat pada penelitian ini, karena terdapat pengaruh negatif dari semua variabel independen terhadap *tax avoidance*.

#### C. Keterbatasan Peneliti

Hasil penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dapat mempengaruhi hasil penelitian dari tujuan yang ingin dicapainya, antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian, sehingga tidak bisa membedakan spesifikasi beberapa industri yang lain. Seperti keseluruhan BUMN yang ada di Indonesia.
2. Diperoleh Adjusted R Square sebesar -0,009 atau -0,9% ini berarti variabel bebas yang terdiri dari insentif eksekutif, kepemilikan institusional, komisaris independen, corporate risk dan koneksi politik

secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu *tax avoidance* sebesar -0,9% dan sisanya sebesar 99,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggodo, Y. P., Cahyaningrum, W., Fauziyah, A. N., Khoiriyah, I. L., Kartikasari, O., & Cholissodin, I. (2017). Hybrid K-means Dan Particle Swarm Optimization Untuk Clustering Nasabah Kredit. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 4(2), 104. <https://doi.org/10.25126/jtiik.201742303>
- Atari, J., Nasir, A., & Ilham, E. (2016). *PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP TAX AGGRESSIVE*. 26(4), 1–37.
- Ayu, G., Dewi, P., & Sari, M. M. R. (2015). *PENGARUH INSENTIF EKSEKUTIF , CORPORATE RISK DAN CORPORATE GOVERNANCE PADA TAX AVOIDANCE*. 50–67.
- Ayu, G., Lestari, W., Putri, I. G. A. M. A. D., & A. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.3.*, 18(3), 2028–2054.
- Budiman, J., & Setiyono. (2012). *PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)*.
- Darwis, H. (2019). *PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK ( Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017 )*. 1(1), 15–29.
- Diawati. (2017). analisis Pengaruh Good Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance”.STIE Perbanas Surabaya Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Faccio, M. (2006). Politically connected firms. *American Economic Review*, 96(1), 369–386. <https://doi.org/10.1257/000282806776157704>
- Fadila, M., & Rasuli, P. M. (2017). *PENGARUH RETURN ON ASSET, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN KOMPENSASI RUGI FISKAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK*. 4(1), 1684. Retrieved from <http://jom.unri.ac.id>

- Fiandri, K. A., & Muid, D. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Mediasi Padaperusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesiatahun 2011 – 2014. *Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Mediasi Padaperusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesiatahun 2011 – 2014.*, 6(2), 31–43.
- Innocent, O. C., & Gloria, O. T. (2018). Effect of Corporate Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness of Quoted Manufacturing Firms on the Nigerian Stock Exchange. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2018/38594>
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *Accounting Review*, 92(2), 101–122. <https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Mappadang SE. MM, BKP, D. A., SE.Ak, MM, CA, P. D. T. W., & SE, SH, MM, A. M. W. (2018). The Effect of Corporate Governance Mechanism on Tax Avoidance: Evidence from Manufacturing Industries Listed in the Indonesian Stock Exchange. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 5(10), 5003–5007. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i10.02>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan-Edisi-Terbaru-2016*.
- Mulyani1, S., Anita Wijayanti, & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2016). *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 18(1), 19–39.
- Ningsing, winda fitria, & Mildawati, T. (2017). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN Jenis Sesi Paper : Full paper Winda Fitria Ningsih Titik Mildawati Abstract : The purpose of this research is to examine the influence of corporate governance to the tax avoidance of com.* 1–27.
- Putra, R. W. S. (2019). *PENGARUH CORPORATE RISK, KONEKSI POLITIK DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI*.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>

- Saputra, A. D. (2018). *Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk, Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax avoidance*.
- Tehupuring, R., & Rossa, E. (2016). Pengaruh Koneksi Politik dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penhindaran Pajak di Lembaga Perbankan Yang Terdaftar di Pasar Modal Indonesia Periode 2012-2014. *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*, 366–376.
- Wulansari, N., & Dewi, H. R. (2017). *PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN , AKUNTANSI , PERTUMBUHAN PENJUALAN*. 1–27.
- Yuniarsih, N. (2018). The effect of accounting conservatism and corporate governance mechanism on tax avoidance. *Academic Research International*, 9(3), 68–76.



# LAMPIRAN

**Lampiran 1**  
**Daftar nama perusahaan yang menjadi sampel**  
**Penelitian tahun 2015-2019**

No	Kode	Nama Perusahaan
1	INAF	PT Indofarma (Persero) Tbk
2	KAEF	PT Kimia Farma (Persero) Tbk
3	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
4	KRAS	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
5	ADHI	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
6	PTPP	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
7	WIKA	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
8	WSKT	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
9	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
10	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
11	BBTN	PT Tabungan Negara (Persero) Tbk
12	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
13	ANTM	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
14	PTBA	PT Bukit Asam (Persero) Tbk
15	TINS	PT Timah (Persero) Tbk
16	SMGR	PT Semen Indonesia / Semen Gresik (Persero) Tbk
17	JSMR	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
18	GIAA	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
19	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
20	SMBR	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

**Lampiran 2**  
**Hasil Perhitungan *Tax Avoidance* Pada**  
**Perusahaan BUMN Tahun 2015-2019**

<b>NO</b>	<b>KODE PERUSAHAAN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	TLKM	0.25604	0.26009	0.23928	0.25961	0.27214
2	ADHI	0.37671	0.04856	0.50375	0.39145	1.09169
3	ANTM	0.13657	0.72689	0.69959	0.30902	0.71784
4	TINS	0.39605	0.31794	0.28943	0.25006	0.15733
5	SMBR	0.20124	0.25821	0.29815	0.47663	0.65261
6	SMGR	0.22654	0.10808	0.25614	0.24829	0.25801
7	JSMR	0.36218	0.31951	0.35588	0.36563	0.03683
8	GIAA	0.26894	0.47369	0.34902	0.87643	0.20049
9	KRAS	0.02076	0.07368	0.04562	0.05416	0.96938
10	PGAS	0.26048	0.18162	0.39349	0.37658	0.59635
11	PTPP	0.40007	0.35925	0.01292	0.02201	0.02516
12	WIKA	0.00618	0.02385	0.01446	0.05073	0.06031
13	INAF	0.41104	0.01676	0.86801	0.01139	0.19118
14	KAEF	0.18323	0.06449	0.26239	0.30452	0.58527
15	WSKT	0.33063	0.15889	0.09069	0.31097	0.63134
16	BBNI	0.20204	0.20224	0.19776	0.23858	0.19931
17	BBRI	0.21798	0.22799	0.21548	0.22357	0.15553
18	BBTN	0.27183	0.21356	0.21599	0.22224	0.49092
19	BMRI	0.19784	0.21121	0.20269	0.23121	0.21914
20	PTBA	0.02007	0.01349	0.25059	0.24679	0.25934

**Lampiran 3**  
**Hasil Perhitungan Insentif Eksekutif Pada**  
**Perusahaan BUMN Tahun 2015-2019**

<b>NO</b>	<b>KODE PERUSAHAAN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	TLKM	0.00226	0.00471	1.09156	0.00363	0.00289
2	ADHI	0.01154	0.04946	0.00112	0.00012	0.00199
3	ANTM	0.00142	0.00175	0.00147	0.00116	0.00185
4	TINS	0.03062	0.09004	0.00008	0.03441	0.02118
5	SMBR	0.05101	0.04263	0.06253	0.06422	0.12844
6	SMGR	0.06202	0.04061	0.04228	0.03593	0.03897
7	JSMR	0.06876	0.06262	0.18065	0.01943	0.03182
8	GIAA	0.03766	0.56608	0.59328	0.08717	0.20695
9	KRAS	0.26928	0.01324	0.33221	0.40987	0.06202
10	PGAS	0.03914	0.04234	0.02414	0.02532	0.13354
11	PTPP	0.00378	0.05035	0.31076	0.02246	0.00221
12	WIKA	0.00264	0.25982	0.00135	0.80002	0.00088
13	INAF	0.00245	0.03061	0.01126	0.00508	0.05379
14	KAEF	0.00592	0.00623	0.00899	0.00824	0.27036
15	WSKT	0.82307	0.00668	0.00876	0.00993	0.00163
16	BBNI	0.19964	0.22294	0.01147	0.00692	0.00762
17	BBRI	0.00189	0.20971	0.00295	0.00553	0.00678
18	BBTN	0.12891	0.12379	0.03516	0.03903	0.00267
19	BMRI	0.02136	0.02159	0.01492	0.01599	0.01508
20	PTBA	0.0806	0.07899	0.89948	0.24544	0.57406

**Lampiran 3**  
**Hasil Perhitungan Kepemilikan Institusional Pada**  
**Perusahaan BUMN Tahun 2015-2019**

<b>NO</b>	<b>KODE PERUSAHAAN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	TLKM	0.59289	0.58137	0.57744	0.57082	0.57082
2	ADHI	0.00257	0.51003	0.51003	0.51003	0.51003
3	ANTM	0.65001	0.65001	0.68545	0.65001	0.65001
4	TINS	0.65001	0.65001	0.65001	0.65001	0.65001
5	SMBR	0.76237	0.76237	0.75568	0.75568	0.75568
6	SMGR	0.05105	0.05105	0.05105	0.05105	0.51005
7	JSMR	0.65048	0.72832	0.69999	0.75421	0.75421
8	GIAA	0.74339	0.74339	0.74339	0.74339	0.74339
9	KRAS	0.79999	0.51003	0.79984	0.79984	0.79984
10	PGAS	0.56964	0.39482	0.56964	0.56964	0.56964
11	PTPP	0.06495	0.00512	0.00512	0.00512	0.00512
12	WIKA	0.00654	0.44593	0.44593	0.44593	0.44593
13	INAF	0.80664	0.87117	0.87117	0.88005	0.88005
14	KAEF	0.90025	0.90041	0.90041	0.94476	0.90041
15	WSKT	0.00066	0.00066	0.00066	0.00066	0.00066
16	BBNI	0.01163	0.01163	0.01163	0.58836	0.58836
17	BBRI	0.56682	0.56682	0.56682	0.56682	0.56682
18	BBTN	0.59999	0.59999	0.59999	0.59999	0.59999
19	BMRI	0.59999	0.59999	0.59999	0.59999	0.43749
20	PTBA	0.65017	0.65017	0.65017	0.65017	0.67876

**Lampiran 4**  
**Hasil Perhitungan Komisaris Independen Pada**  
**Perusahaan BUMN Tahun 2015-2019**

<b>NO</b>	<b>KODE PERUSAHAAN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	TLKM	0.42857	0.42857	0.57142	0.42857	0.36363
2	ADHI	0.33333	0.33333	0.33333	0.33333	0.33333
3	ANTM	0.33333	0.5	0.25	0.4	0.25
4	TINS	0.5	0.5	0.4	0.4	0.44444
5	SMBR	0.6	0.6	0.375	0.4	0.33333
6	SMGR	0.28571	0.28571	0.28571	0.33333	0.28571
7	JSMR	0.42857	0.33333	0.28571	0.33333	0.33333
8	GIAA	0.33333	0.33333	0.33333	0.42857	0.4
9	KRAS	0.33333	0.33333	0.33333	0.33333	0.33333
10	PGAS	0.33333	0.33333	0	0.4	0.42857
11	PTPP	0.5	0.5	0.33333	0.16666	0.33333
12	WIKA	0.42857	0.33333	0.33333	0.375	0.42857
13	INAF	0.66666	0.33333	0.33333	0.25	0.33333
14	KAEF	0.2	0.25	0.4	0.4	0.4
15	WSKT	0.33333	0.33333	0.33333	0.33333	0.5
16	BBNI	0.5	0.6	0.5	0.55555	0.625
17	BBRI	0.625	0.55555	0.55555	0.625	0.625
18	BBTN	0.57142	0.42857	0.44444	0.55555	0.5
19	BMRI	0.5	0.5	0.54545	0.5	0.63636
20	PTBA	0.33333333	0.33333	0.33333	0.5	0.33333

**Lampiran 5**  
**Hasil Perhitungan *Corporate Risk* Pada**  
**Perusahaan BUMN Tahun 2015-2019**

<b>NO</b>	<b>KODE PERUSAHAAN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	TLKM	0.03094	0.33126	0.32551	0.28701	0.29308
2	ADHI	0.05449	0.04619	0.04619	0.05498	0.05217
3	ANTM	0.06623	0.35098	0.07677	0.10001	0.00641
4	TINS	0.08105	0.11068	0.11922	0.07543	0.04455
5	SMBR	0.04315	0.09602	0.06714	0.07282	0.08038
6	SMGR	0.19588	0.15743	0.11022	0.12951	0.10906
7	JSMR	0.11667	0.09772	0.07304	0.07797	0.00007
8	GIAA	0.10401	0.07034	0.01785	0.31116	0.04721
9	KRAS	0.35529	0.02622	0.54127	0.10935	0.03196
10	PGAS	0.05264	0.11813	0.08771	0.15092	0.14106
11	PTPP	0.02665	0.01307	0.25199	0.03602	0.04728
12	WIKA	0.04738	0.10871	0.10916	0.08529	0.03147
13	INAF	0.03581	0.02424	0.00605	0.02134	0.00605
14	KAEF	0.12193	0.10232	0.09326	0.08667	0.02733
15	WSKT	0.07296	1.02787	0.00006	0.05787	0.02839
16	BBNI	0.03676	0.03811	0.03481	0.03421	0.03439
17	BBRI	0.04484	0.02416	0.02465	0.05388	0.07919
18	BBTN	0.01624	0.01485	0.09946	0.01953	0.00233
19	BMRI	0.03486	0.03578	0.03405	0.03873	0.02926
20	PTBA	0.14701	0.13755	0.26495	0.24659	0.02397

**Lampiran 6**  
**Hasil Perhitungan Koneksi Politik Pada**  
**Perusahaan BUMN Tahun 2015-2019**

<b>NO</b>	<b>KODE PERUSAHAAN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	TLKM	0	0	1	0	1
2	ADHI	1	1	0	1	1
3	ANTM	0	0	0	1	1
4	TINS	0	0	1	0	1
5	SMBR	0	1	0	1	0
6	SMGR	0	0	0	1	1
7	JSMR	0	0	1	0	0
8	GIAA	1	0	0	0	1
9	KRAS	1	0	1	1	1
10	PGAS	1	1	0	1	0
11	PTPP	1	1	0	1	0
12	WIKA	1	0	1	0	1
13	INAF	0	1	1	0	1
14	KAEF	0	1	0	1	0
15	WSKT	1	1	0	1	1
16	BBNI	1	0	1	1	0
17	BBRI	1	1	0	0	0
18	BBTN	1	0	0	0	1
19	BMRI	1	0	0	1	0
20	PTBA	0	0	1	1	0



